



BBPOM
DI JAYAPURA

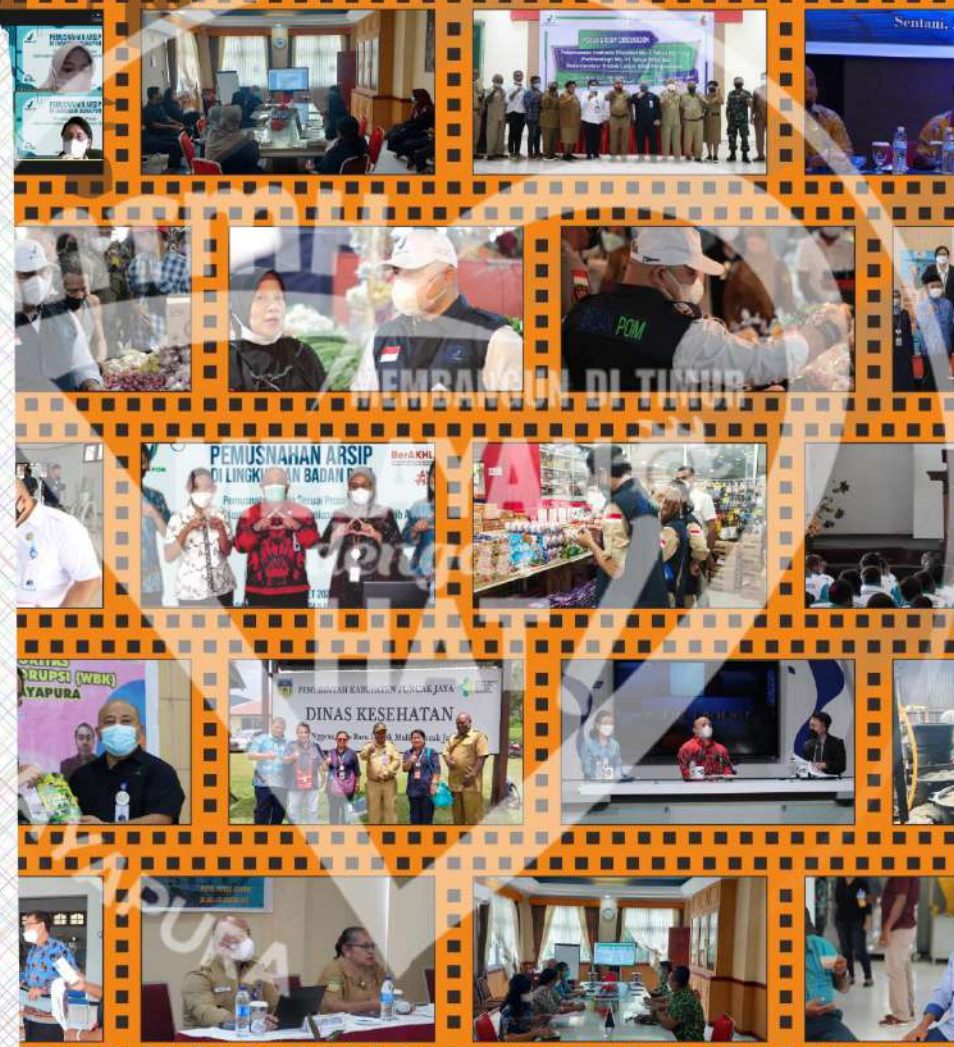
BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

LAPKIN

LAPORAN KINERJA

2022



HIGHLIGHT

❖ JANUARI



Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan KIE dalam bentuk Talkshow bersama dengan organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Papua.



Balai Besar POM di Jayapura berkolaborasi dengan PMI Jayapura menggelar aksi Donor Darah. Dalam suasana semarak perayaan HUT BPOM ke-21

❖ FEBRUARI



Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan Koordinasi dengan Kepala KPPBC Tioe Madya Pabean C Jayapura Edy Susanto dan Kepala seksi P2 Robinsar Samosir pada hari Senin, 14 Februari 2022 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura

❖ MARET

Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten, Biak Numfor



❖ APRIL



Balai Besar POM di Jayapura menghadiri Talkshow dengan tema "Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2022" di TVRI Papua

❖ MEI

Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan tindak pidana obat dan makanan di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua

Balai Besar POM di Jayapura melakukan kegiatan Komunikasi & Koordinasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Keroom dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keroom untuk membangun sinergisme, khususnya dalam pendampingan UMKM sektor produksi di bidang obat dan makanan di Kabupaten Keerom.



Kabupaten Keerom memiliki potensi sumber daya alam dan dapat diolah menjadi produk obat dan makanaa antara lain sagu, buah merah, jagung, serai dan produk pertanian lainnya, dimana produk- produk tersebut sejauh ini masih hanya berupa produk pangan segar, belum dikembangkan menjadi produk pangan olahan ataupun obat tradisional.

❖ JUNI



Balai Besar POM di Jayapura Melakukan pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Aula Balai Besar POM Jayapura.



Balai Besar POM di Jayapura telah dilaksanakan Audit Internal QMS ISO 9001:2015 oleh auditor terdiri dari 5 orang Auditor QMS Badan POM (3 orang dari BBPOM Manokwari dan 2 orang dari BBPOM Jayapura) pada tanggal 7-8 Juni 2022 di Aula Balai Besar POM di Jayapura.



Dalam rangka melanjutkan Program Prioritas Nasional “Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Balai Besar POM di Jayapura menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Biak Numfor



Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dalam rangka kegiatan Intervensi GKPD di tahun 2022 yang

dilaksanakan di 5 Kelurahan / Kampung di 3 Kabupaten yaitu Kelurahan Snerbo dan Brambaken di Kabupaten Biak, Kampung Honelama di Kabupaten Jayawijaya serta Kelurahan Girmulyo dan Karang Tumaritis di Kabupaten Nabire.



❖ JULI

Balai Besar POM di Jayapura melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Papua untuk agenda penyamaan persepsi tentang penerapan peraturan perundang-undangan khususnya Permenkes 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.



Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan pelatihan pengawasan pangan aman dari bahan berbahaya bagi petugas dari Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindag Kabupaten Supiori pada tanggal 12-14 Juli 2022 di Aula Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura menyelenggarakan Pemilihan Duta Kosmetik Aman yang merupakan bagian dari Program Goes to School and Campus Badan POM di Aula Kantor Balai Besar POM di Jayapura



Balai Besar POM di Jayapura hadir pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang menjelaskan tentang organisasi, tugas dan fungsi serta berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura dalam rangka mengawal mutu dan keamanan Obat dan Makanan di Provinsi Papua, dan dilanjutkan dengan materi Cek KLIK dan BPOM Mobile kepada ratusan mahasiswa baru yang hadir secara luring maupun daring di Kampus Poltekes Kemenkes Padang Bulan Jayapura.



❖ AGUSTUS



Balai Besar POM di Jayapura telah dilaksanakan audit Surveillance ISO 9001:2015 secara Daring/Remote oleh Auditor dari Sucofindo ICS Pada tanggal 23 Agustus 2022 di Kantor Balai Besar POM di Jayapura



Balai Besar POM di Jayapura tetap berkomitmen penuh bagi pendampingan UMKM sektor produksi Obat dan Makanan di provinsi Papua hingga terus berupaya aktif bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan instansi lintas sektor terkait.

❖ SEPTEMBER



Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan Pelatihan Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi personil pengujian laboratorium mikrobiologi dalam

hal uji potensi antibiotic di Aula Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura melakukan koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk memperkuat komitmen serta dukungan Pemerintah Daerah.



❖ OKTOBER

Balai Besar POM di Jayapura melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jehezkiel Devy Sudarso, S.H, C.N. yang didampingi Asisten Pidana Umum Riyadi, SH Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua.



Balai Besar POM di Jayapura melakukan Podcast dengan Pengurus Cabang IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Jayapura untuk Sinergisme PC IAI Kota Jayapura dan

BBPOM di Jayapura Dalam Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kefarmasian di Jayapura.

❖ NOVEMBER

Balai Besar POM di Jayapura menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Perkuatan Sinergitas Penta Heliks dalam Penanganan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat



Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan kegiatan Monitoring Cara distribusi Obat Yang Baik (CDOB) pada Sarana PBF (Pedagang Besar Farmasi). Kegiatan ini dilakukan secara *Luring* dan *Daring* kepada PBF di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.



Balai Besar POM Jayapura melaksanakan program JAHE MANIS untu melakukan KIE kepada para stakeholder

terkait serta para pelaku usaha dan konsumen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat memilih dan menggunakan kemasan pangan yang aman dan bermutu.

❖ DESEMBER



Balai Besar POM di Jayapura melakukan Intensifikasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Dalam rangka mendukung pelaksanaan hari besar Natal dan Tahun Baru 2023 di Papua,



Balai Besar POM di Jayapura dalam acara Dialog Interaktif Talkshow Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal Tahun 2022 dan Menyambut Tahun Baru 2023 yang ditayangkan di TVRI Papua



Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan kegiatan talkshow terkait Pengawasan pangan menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di RRI Jayapura

DAFTAR ISI

MTMH

MENYANGGUNG KEBERKONTRIBUSI

MELAYU



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	7
1.4.2 Permasalahan Utama.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. RENCANA STRATEGIS	14
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	27
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
2.5. METODE PENGUKURAN	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	40
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	61
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	68
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	86

3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura ..	126
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	147
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	156
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	162
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	177
3.1.10.Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	182
3.1.11.Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel.....	191
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	196
3.3 REALISASI ANGGARAN	199
3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	201
BAB IV. PENUTUP	205
4.1. KESIMPULAN	205
4.2. SARAN.....	207
LAMPIRAN	209

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024	23
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 (RKT).....	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 (PK)	27
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022.....	29
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	35
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Balai dalam Klaster 5.....	39
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022	41
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022	42
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	42
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024..	42
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022	46
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	46
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024.....	47
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022	50
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan periode sebelumnya....	50
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	50
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022.....	54

Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	54
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024..	55
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2022.....	58
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	58
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024...	58
Tabel 3.19	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2022 -	62
Tabel 3.20	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022.....	63
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	63
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	64
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022.....	69
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022	70
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	71

Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	71
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022	74
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya	75
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020- 2024	75
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022	80
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	80
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	81
Tabel 3.33	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022.....	86
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022- -	89
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan periode sebelumnya	89
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	89
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 -	93

Tabel 3.38	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	94
Tabel 3.39	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	94
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022.....	98
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan periode sebelumnya	99
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	99
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022.....	103
Tabel 3.44	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	104
Tabel 3.45	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020- 2024.....	104
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022.....	108
Tabel 3.47	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	109
Tabel 3.48	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	109
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022	114

Tabel 3.50	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya	115
Tabel 3.51	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	115
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022	122
Tabel 3.53	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan periode sebelumnya	123
Tabel 3.54	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	123
Tabel 3.55	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022	127
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022	128
Tabel 3.57	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	128
Tabel 3.58	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	128
Tabel 3.59	Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022.....	132
Tabel 3.60	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 dengan periode sebelumnya	133
Tabel 3.61	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	133
Tabel 3.62	Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022.....	137

Tabel 3.63	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022 dengan periode sebelumnya	138
Tabel 3.64	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	138
Tabel 3.65	Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022.....	142
Tabel 3.66	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	142
Tabel 3.67	Perbandingan Realisasi kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	143
Tabel 3.68	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022	147
Tabel 3.69	Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	148
Tabel 3.70	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan periode sebelumnya	148
Tabel 3.71	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	149
Tabel 3.72	Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	152
Tabel 3.73	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan periode sebelumnya	152
Tabel 3.74	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	153
Tabel 3.75	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022.....	156
Tabel 3.76	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022	157

Tabel 3.77	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya	157
Tabel 3.78	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	158
Tabel 3.79	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022	162
Tabel 3.80	Capaian Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022	164
Tabel 3.81	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya	164
Tabel 3.82	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Renstra 2020 - 2024	165
Tabel 3.83	Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022	171
Tabel 3.84	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya	171
Tabel 3.85	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 dengan Renstra 2020 - 2024	172
Tabel 3.86	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022	180
Tabel 3.87	Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022	181
Tabel 3.88	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya	181
Tabel 3.89	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Renstra 2020 - 2024	181
Tabel 3.90	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2022	185
Tabel 3.91	Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022	186

Tabel 3.92	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan periode sebelumnya	186
Tabel 3.93	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024	187
Tabel 3.94	Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022.....	190
Tabel 3.95	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 dengan periode sebelumnya	191
Tabel 3.96	Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024	191
Tabel 3.97	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022	194
Tabel 3.98	Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022	195
Tabel 3.99	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya.....	195
Tabel 3.100	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024	196
Tabel 3.101	Tabel 3.101 Perubahan PAGU Anggaran Tahun 2022	200
Tabel 3.102	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Sasaran Kegiatan	201
Tabel 3.103	Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Periode Tahun 2022.....	203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura.....	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM.....	5
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura.....	9
Gambar 1.4	Catchment Area BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke.....	10
Gambar 1.5	Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua.....	10
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura.....	15
Gambar 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022.....	34
Gambar 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	43
Gambar 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang Setara Tahun 2022.....	47
Gambar 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	51
Gambar 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	55
Gambar 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	59
Gambar 3,7	Perbandingan ndeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	64
Gambar 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	72
Gambar 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	76

Gambar 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	81
Gambar 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	90
Gambar 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	95
Gambar 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	100
Gambar 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	104
Gambar 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	110
Gambar 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	116
Gambar 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	124
Gambar 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	129
Gambar 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	133
Gambar 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	138
Gambar 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai setara Tahun 2022.....	143

Gambar 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Balai setara Tahun 2022.....	149
Gambar 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Balai setara Tahun 2022.....	153
Gambar 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan Balai setara Tahun 2022.....	158
Gambar 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	165
Gambar 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai setara Tahun 2022.....	172
Gambar 3.27	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 dan 2022.....	173
Gambar 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai setara Tahun 2022.....	182
Gambar 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan Balai setara Tahun 2022.....	187
Gambar 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan Balai yang setara Tahun 2022.....	192
Gambar 3.31	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai Sejenis / Setara Tahun 2022.....	196
Gambar 3.32	Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi.....	198

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	209
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	214
Lampiran 3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021	220
Lampiran 4	Data Kertas Kerja Tahun 2022.....	222
Lampiran 5	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran.....	229
Lampiran 6	Perhitungan NPS	231

KATA PENGANTAR



Kata Pengantar



Balai Besar POM di Jayapura, hadir di tanah Papua untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan vaksin agar produk-produk tersebut aman, bermutu dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seluruh tugas fungsi pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan dapat pertanggungjawaban kepada masyarakat, dengan upaya yang sistematis meningkatkan kapasitas kinerja institusi dari waktu ke waktu.

Kinerja organisasi diukur berdasarkan capaian realisasi setiap target indikator yang telah ditetapkan pada Renstra BBPOM di Jayapura, rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tantangan dan peluang, kekuatan dan kelemahan, diformulasi sedemikian rupa, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan harapan realisasi memenuhi ekspektasi. Seluruh capaian terangkum dalam Laporan Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022.

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022 dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, selain itu menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang

diperoleh. Secara umum nilai pencapaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, melalui Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022 ini, diharapkan menjadi alat pemacu peningkatan kinerja setiap fungsi dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat serta terus menerus melakukan ditahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Jayapura, 17 Februari 2023

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

NIP. 19790210 200604 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022 ini meliputi informasi tentang Pengukuran Kinerja Tahun 2022 berkaitan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang tingkat pencapaiannya telah ditetapkan, dan untuk tahun 2022 pencapaian sasaran untuk 11 (sebelas) sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel.

Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa sasaran kegiatan BBPOM di Jayapura terlaksana dengan efisien dan seluruh indikator dapat dicapai dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Tidak dapat Disimpulkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86.6	93.64	108.13
		IKSK 2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82.19	100.23
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92.96	103.29
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92.96	108.09
		IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86.4	97.08
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	65.8	96.76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3	94.5	102.38
		IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.4	95.32
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.5	89.4	98.78
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98.08	108.98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66,2	110,33
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,4	100,51
		IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4,4	4,24	96,36
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103,90
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	93,33	101,23
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	58	103,57
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	13	13	100,00
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,10	100,10
		IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	198.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.8	90.05	103.74
		IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.2	77,5	94,28
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.4	85.4	101.18
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80.2	104.16
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2,9	128,89
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.9	89.80	96.66

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.25.291.354.710** atau **99.05% dari total seluruh anggaran.**

Jayapura, 17 Februari 2023
Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.
NIP.19790210 200604 1 003

BAB I PENDAHULUAN

M T M H

MENDANGUNG

MELAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BBPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Pada tahun 2022, terbentuk tiga provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut terdiri dari :

1. Provinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.

2. Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai.
3. Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Jayawijaya terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Balai koordinator untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Loka POM di Kabupaten Mimika dengan wilayah pengawasan di Kab. Mimika, Kab. Asmat, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Nduga. Loka POM di Kabupaten Merauke dengan wilayah pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi. Loka POM di Kabupaten Mimika terhitung sejak Januari 2021 merupakan Loka mandiri sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke terhitung sejak Januari 2022 sehingga

Laporan Kinerja tahun 2022 kedua Loka POM tersebut terpisah dari Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

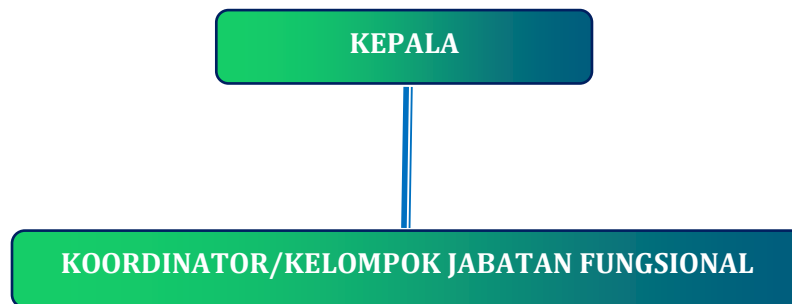
Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b. Kelompok Substansi Pengujian

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

c. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

d. Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi

kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

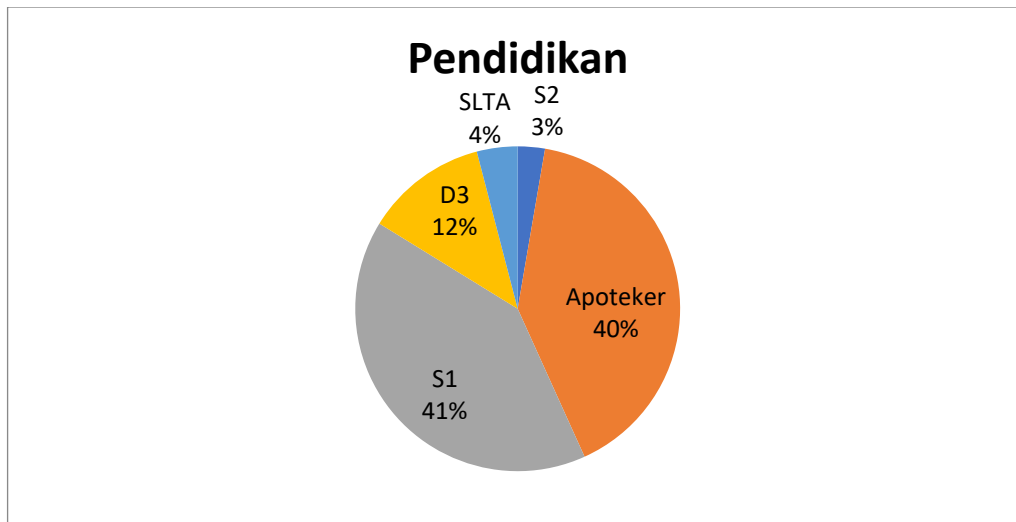
a. Lingkungan Internal

Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2022 sebesar **Rp. 28.778.331.000,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun Anggaran 2022. Namun terdapat revisi anggaran dikarenakan *refocusing* anggaran untuk percepatan ekonomi nasional Covid-19 sehingga Anggaran Tahun 2022 menjadi **Rp. 25.533.301.000,-** dengan realiasi **Rp.25.291.354.710.-**

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 20 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 74 orang personil (63% perempuan, 37% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura, memerlukan SDM sebanyak 123 orang, sehingga masih terdapat gap SDM sebanyak 49 orang.

Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Catchment area Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke dan 6 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Dari 20 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara. Kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas, sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten.



Gambar 1.4 *Catchment Area* BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke



Gambar 1.5 Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua

1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama tahun 2020-2022 telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang akan terus dicari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan distribusi obat seperti adanya sarana pelayanan obat yang tidak mempunyai penanggung jawab. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan namun tidak dilakukan perbaikan sehingga dilanjutkan ke *pro justitia*. Serta adanya penjualan obat Psikotropika/Obat-obat Tertentu secara *online* semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan obat dan penyebaran obat ilegal di wilayah Papua. Penjualan obat secara *online* ini biasanya menggunakan media seperti website mandiri, *e-commerce* dan media sosial (*facebook, instagram*, dan jejaring sosial lainnya). Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan obat – obatan secara *online* ini, antara lain sulitnya mengidentifikasi atau menelusuri pelaku pelanggaran karena menggunakan data fiktif atau identitas/alamat penjual dan pembeli tidak lengkap serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih obat yang sesuai ketentuan.
4. Realisasi Indeks RB BBPOM Di Jayapura pada tahun 2022 yang telah mencapai target 90,05 dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi, namun untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat diperoleh dikarenakan masih terdapat satu (1) persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu tindaklanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai saran, sehingga belum dapat diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN).

Isu Strategis:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua tahun 2022 adalah 61,39, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 60,62 meski masih urutan terendah secara nasional. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi
Berdasarkan data BKKK Penderita stunting di Provinsi Papua pada tahun 2022 masih tinggi, yakni di kisaran angka 34,6%. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi

ibu hamil dan bayi. “Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa

3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten

Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan serta informasi yang disebar luaskan melalui *online* tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

4. Daya saing UMKM yang masih rendah

Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.

5. Pengawasan Keamanan Obat

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Jayapura melakukan pengawasan secara komprehensif sampai ke pelosok daerah. Pengawasan dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, yang berfokus pada intensifikasi dan intervensi/pendampingan pengelolaan vaksin COVID-19 serta pengawasan *Anti Microbial Resistance* (AMR) di sarana pelayanan kefarmasian. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar.

6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang beresiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul apabila obat JKN tidak terjamin mutunya, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan merupakan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan telah menjadi kebijakan dalam alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sejak tahun 2020. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai stimulus untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada tahun 2022, dua (2) kabupaten/kota di Provinsi Papua menerima alokasi dana DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 406.876.000,- dan Kota Jayapura sebesar Rp. 445.836.000,-

8. Cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam Sirup Obat

Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang diduga akibat senyawa Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam obat sirup telah menelan korban anak – anak yang meninggal dunia. Menanggapi isu tersebut, BPOM melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. BBPOM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM turut serta dalam melakukan sampling dan pengujian berupa pengembangan/verifikasi metode untuk pengujian EG dan DEG dalam sediaan sirup dan melakukan KIE terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile dan e-MESO Mobile, agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar di BPOM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber resmi serta selalu ingat Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan obat.

BAB II PERENCANAAN

MTMMH

MEMBANGUN DI TUNGGU

MELAYATI

dan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

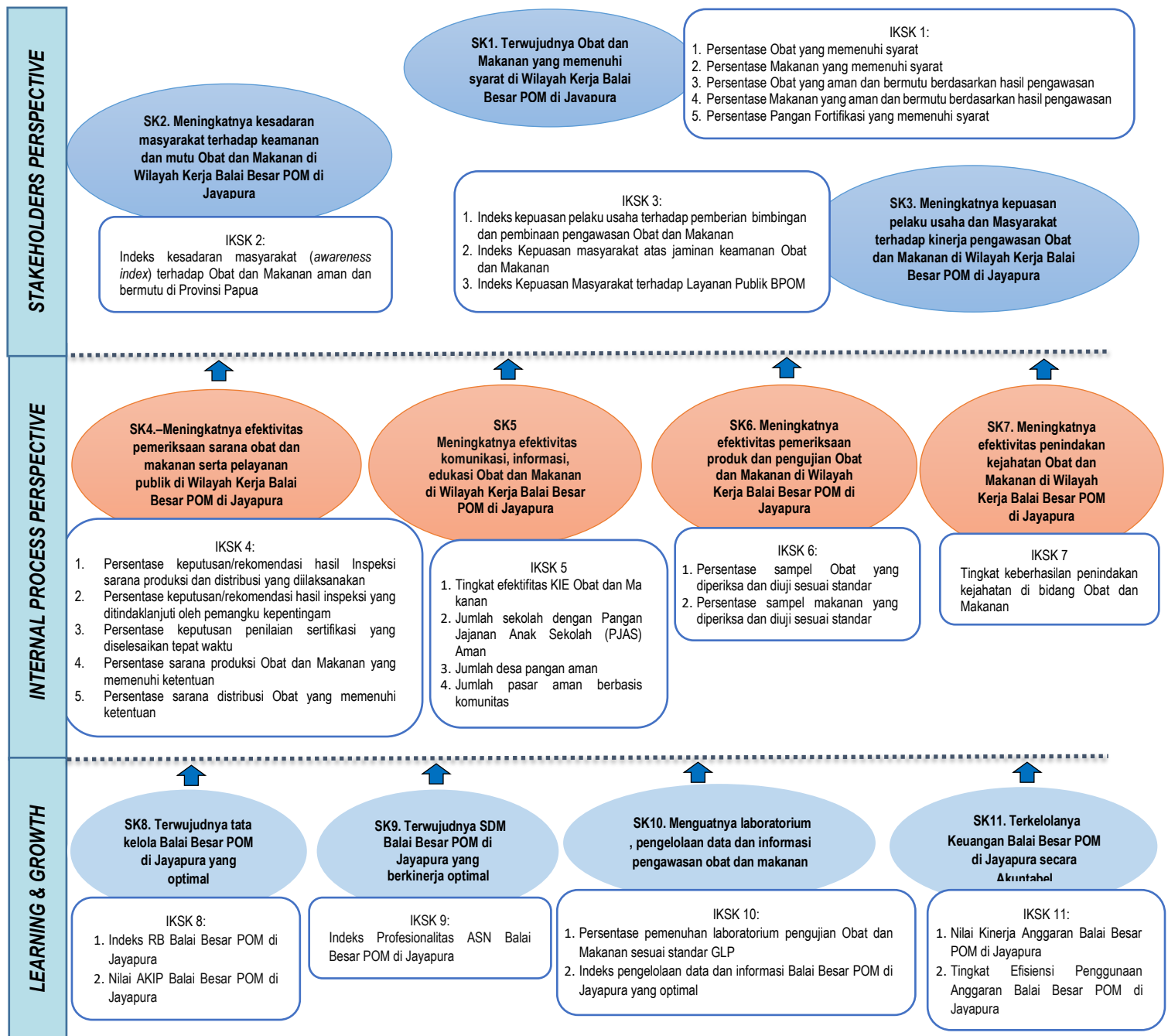
2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

S.K.1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik mulai dari proses produksi.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

S.K.2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 75 pada tahun 2024

S.K.3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94,6 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 70,01 di tahun 2024

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

S.K.4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 61 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024
- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,55 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
- f) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024
- g) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 81 di Tahun 2024

S.K.5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada masyarakat. KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 22 di Tahun 2024

S.K.6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di Tahun 2024

S.K.7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan

masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

Untuk target akhir renstra tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian target dan akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan keuangan

S.KK.8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain

(i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 90,8 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 87,2 pada akhir 2024.

S.K.9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

S.K.10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 87 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

S.K.11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 95,3 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan 	<p>Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
			Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
<p>Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong</p>	<p>Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan 	<p>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura
	<p>Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</p>	<p>Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan</p>	<p>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas
	<p>Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 	<p>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p> <p>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	<p>Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 	<p>Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal</p> <p>Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura 1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<p>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
			<p>Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

				2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura
--	--	--	--	--

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 disusun pada tanggal 17 Desember tahun 2021.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		3. Jumlah desa pangan aman	13
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2022 sebesar **Rp.25.533.301.000** ,- sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2022. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp 837,368,000,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.36.388.000,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.192.443.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura sebesar Rp.2.474.560.000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.2.552.194.000,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.836,363,000,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.635.572,000,-
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp.406.247.000,-

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp.476.764.000,-
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.1.451.566,000,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp.15.633.656.000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.533.301.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		Indeks s kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	380,021,000
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	104,400,000
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	102,965,000
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	107,640,000
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	142,342,000
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT											68,00	36,388,000	
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92,30	10,385,000
8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												66,51	170,630,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90,50	11,428,000
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	21,200,000
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	498,222,000
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	118,792,000
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	134,537,000
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	1,031,200,000
15		Indeks Pelayanan Publik												4,40	570,679,000
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,00	7,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	77,00	99,840,000
17		Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
18	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UP	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman			20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00	56,00	751,228,000
19		Jumlah desa pangan aman		5,00	25,00	30,00	40,00	50,00	50,00	65,00	75,00	85,00	95,00	13,00	1,037,457,000
20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		5,00	25,00	40,00	55,00	60,00	70,00	70,00	80,00	90,00	90,00	12,00	498,425,000
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	27,00	35,00	43,00	54,00	63,00	71,00	78,00	90,00	95,00	100,00	518,450,000
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	28,00	38,00	48,00	55,00	62,00	73,00	80,00	93,00	99,00	100,00	317,913,000
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	45,00	48,00	50,00	635,752,000
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT												86,8	392,767,000
25		Nilai AKIP UPT													82,20
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84,40	476,674,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												77	1,336,960,000
28		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal													2,25
29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	85,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	92,90	15,633,656,000

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

BAB III AKUNTABILITAS

M T M M H

MEMBANGUN DI TUMBUH

MELAYAKAN

dan

YAPURA

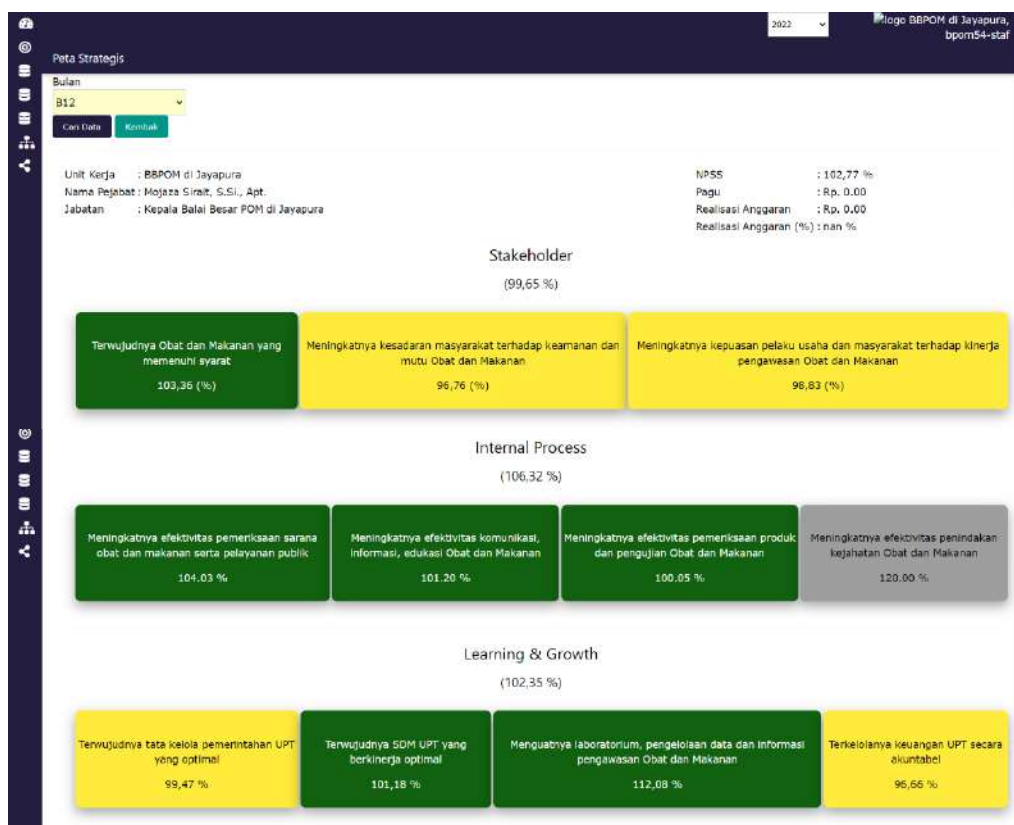


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* yang diimplementasikan di Balai Besar POM di Jayapura diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar 102,77%.



Gambar 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022

Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada aplikasi *e-Performance*

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and*

Growth yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stakeholder* sebesar 99,65% dengan kriteria **Belum Memenuhi ekspektasi**, perspektif *Internal Process* sebesar 106,32% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 102,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Secara umum dapat disimpulkan Balai Besar POM di Jayapura telah berhasil mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 20 indikator dinyatakan “Memenuhi Ekspektasi” capaiannya yaitu 100%-110,33%, 7 indikator dinyatakan “Belum Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar antara 95,19%-98,78%, 2 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya berkisar antara 128,89%-198%. Adapun capaian dari 29 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,6	93,64	108,13
		IKSK 2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82,19	100,23
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92,96	103,29
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92,96	108,09
		IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86,4	97,08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	65,8	96,76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3	94,5	102,38
		IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63,4	95,32
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.5	89,4	98,78
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98,08	108,98
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66,2	110,33
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	79	79,4	100,51
		IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4,4	4,24	96,36
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103,90
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	93,33	101,23
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	58	103,57
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	13	13	100,00
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,10	100,10
		IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	198,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,8	90,05	103,74
		IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2	78,25	95,19
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,4	85,4	101,18
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80,2	104,16
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	2,9	128,89
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,9	89,80	96,66

Bila capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura dibandingkan dengan unit lain yang mempunyai beban kinerja setara yaitu Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Samarinda dan Balai Besar POM di Palangkaraya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai dalam Klaster 5

NO	SASARAN STRATEGIS	Capaian BBPOM Jayapura	Capaian BBPOM Serang	Capaian BBPOM Pontianak	Capaian BBPOM Samarinda	Capaian BBPOM Palangkaraya
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	103,36	98,45	95,59	102,99	104,48
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	96,76	98,65	99,46	99,67	112,84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	98,83	102,84	101,27	104,44	109,79
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	104,03	102,57	96,75	101,35	109,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	101,20	100,01	100,10	102,68	99,50
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	100,05	100,00	97,64	95,91	96,01
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	120,00	103,48	104,04	102,04	120,00

NO	SASARAN STRATEGIS	Capaian BBPOM Jayapura	Capaian BBPOM Serang	Capaian BBPOM Pontianak	Capaian BBPOM Samarinda	Capaian BBPOM Palangkaraya
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	99,47	99,90	102,19	100,69	102,07
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	101,18	100,97	102,05	100,50	102,63
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	112,08	111,55	112,72	110,73	112,53
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	96,66	97,32	95,19	94,79	95,83

Dari tabel diatas, diperoleh perbandingan pencapaian kinerja sasaran strategis yaitu sebanyak 5 sasaran strategis belum dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak, sebanyak 4 sasaran strategis belum dicapai oleh Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Serang dan sebanyak 3 sasaran startegis belum dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda dan Balai Besar POM di Palangkaraya.

Terdapat 1 sasaran strategis yang tidak tercapai oleh semua unit kerja yaitu Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran yang diukur dengan 2 (dua) parameter yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bobot 40% dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) bobot 60%.

3.1.1 Sasaran Kegiatan I - Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 (lima) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 103,36% dengan

kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp 821,256,546 -, Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,6	93,64	108,13	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82,19	100,23	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92,96	103,29	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92,96	108,09	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86,40	97,08	Belum Memenuhi Ekspektasi
				103,36	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, 5) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,6	93,64	108,13	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah 93,64% dari target 86,6% dengan capaian 108,13% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	2020	80,8	83,07	102,81
	2021	83,6	81,42	97,39
	2022	86,6	93,64	108,13

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,3	93,64	101,45

Realisasi kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.2, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (92,25%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Serang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, dan BBPOM di Pontianak belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampai dengan bulan Desember sampel acak/random yang masuk laboratorium sebanyak 1070 sampel Obat, dan yang selesai diuji sebanyak 1070 sampel. Terdiri dari 336 sampel obat, 219 sampel Obat Tradisional, 15 sampel Obat Kuasi, 60 sampel Suplemen Kesehatan, dan 440 sampel kosmetik.

Tingginya persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi Suplemen Kesehatan yang mencapai 100%, komoditi obat 99,11%, 3 sampel (0,89%) Tidak Memenuhi Syarat Uji yaitu parameter disolusi, komoditi Obat Kuasi yang mencapai 93,33%, 1 sampel (6,67%) Tidak Memenuhi Syarat, komoditi kosmetik memiliki persentase 90.90% sebanyak 40 sampel (9,1%) kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan, komoditi Obat Tradisional 87,67%, 27 sampel (12,33%) Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat Tradisional dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan sampel Obat Tradisional dan kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, antara lain produk tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan klaim yang berlebihan, serta peringatan pada label kosmetik tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Adanya perubahan definisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, telah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu terhadap sampel kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang mempengaruhi pencapaian realisasi berupa peningkatan persentase indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik, dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem. Hal tersebut akan disampaikan kepada Kedeputian II dan Pusdatin.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal – hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:

1. Reviu sampel yang sudah dilakukan penandaan sebelum terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label kosmetik.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.

3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten. Terhadap rekomendasi Tahun 2021 BBPOM di Jayapura telah mengirimkan permohonan *feedback* atas hasil evaluasi penandaan yang telah dikirimkan ke unit terkait.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Untuk peningkatan capaian di tahun 2022, Balai Besar POM di Jayapura akan memberikan usulan kepada Direktorat terkait melalui Manajemen Representatif agar menetapkan batas waktu <i>feedback</i> terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT.	Telah mengirimkan permohonan <i>feedback</i> atas hasil evaluasi penandaan yang telah dikirim ke unit terkait		

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk

kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label, 5) Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK/TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82,19	100,23	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah 82,19% dari target 82% dengan capaian 100,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	2020	78	78,49	100,63
	2021	78,5	85,17	108,29
	2022	82	82,19	100,23

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi penurunan dengan tahun 2021, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 -2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86	82,19	95,57

Realisasi kinerja indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang Setara Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (83%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, dan kedua Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2022, sampel acak/random makanan yang masuk laboratorium sebanyak 438 sampel. Sebanyak 438 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 360 sampel Memenuhi Syarat dan 78 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain TMK Label penandaan yaitu tidak mencantumkan nilai gizi dan label yang tidak sesuai dengan persetujuan awal pada saat registrasi. Sebagian sampel tidak Memenuhi Syarat mutu baik parameter kimia maupun mikrobiologi antara lain Angka Lempeng Total, Residu Kloramfenikol, HMF (*Hidroxy Methyl Furfural*), Benzoat, Siklamat dan Sakarin.

Sebagian besar sampel yang TMK Penandaan adalah produk dari industri pangan di luar Papua. Oleh karena itu, tindak lanjutnya adalah harus dibangun komunikasi dan koordinasi antar unit di Badan POM termasuk tindak lanjut hasil penandaan yang dilakukan oleh Balai melalui SIPT oleh direktorat terkait. Demikian juga, untuk sampel yang tidak Memenuhi Syarat mutu, tindak lanjutnya perlu komunikasi dan koordinasi antar unit serta pemanfaatan data yang diinput melalui SIPT.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, didukung oleh pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling 2022, kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan label dan pengujian, pengadaan reagen media, alat, dan suku cadang sesuai kebutuhan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian indikator secara berkala.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten.

Terhadap rekomendasi Tahun 2021 BBPOM di Jayapura telah mengirimkan permohonan *feedback* atas hasil evaluasi penandaan yang telah dikirimkan ke unit terkait dan telah dilakukan peningkatan kompetensi pelatihan pengawasan iklan label secara daring.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Sesuai dengan rekomendasi pada triwulan I sampai IV tahun 2021 telah dilakukan penyesuaian kriteria evaluasi penilaian label terhadap hasil evaluasi penilaian oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Demikian juga sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman, serta monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian dilakukan secara intens. Untuk meningkatkan ketepatan penilaian label telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan pengawas iklan label.	Telah mengirimkan permohonan <i>feedback</i> atas hasil evaluasi penandaan yang telah dikirim ke unit terkait		

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, 5) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92,96	103,29	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 adalah 92,96% dari target 90% dengan capaian 103,29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	81	86,6	106,92
	2021	87	80,45	92,47
	2022	90	92,96	103,29

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi mengalami kenaikan dengan tahun 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	92,96	101,04

Realisasi kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.4, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (88,5%) BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, dan ketiga Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Obat meliputi komoditi Obat, Rokok, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Desember 2022 sampel targeted yang di sampling sebanyak 398 sampel. Sampel Obat yang masuk ke laboratorium sebanyak 392 sampel (4 sampel rokok dan 2 sampel vaksin dikirimkan ke PPPOMN). Sampel Obat yang selesai diuji sebanyak 398 meliputi obat sebanyak 83 sampel, obat tradisional sebanyak 94 sampel, obat kuasi sebanyak 6 sampel, Suplemen Kesehatan sebanyak 27 sampel, dan kosmetik sebanyak 188 sampel.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, komoditi rokok 100%, komoditi suplemen kesehatan 92,59%, 2 sampel (7,41%) Tidak Memenuhi Syarat, komoditi Obat Tradisional yang mencapai 92,55%, 7 sampel (7,45%) Tidak Memenuhi Syarat, komoditi Kuasi yang mencapai 83,33% terdapat 1 sampel (16,67%) Tidak Memenuhi Syarat serta komoditi kosmetik yang mencapai 90,42% terdapat 18 sampel (9,58%) Tidak Memenuhi Syarat. Komoditi yang persentase Tidak Memenuhi Syarat yang tinggi adalah Obat Kuasi dan kosmetik, hal ini dikarenakan sampel kuasi yang tidak mencantumkan 2D barcode pada kemasan primer dan sekundernya, sedangkan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, antara lain produk tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan klaim yang berlebihan, serta peringatan pada label kosmetik tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Adanya perubahan definisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, sehingga telah dilakukan revidi terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan yang mempengaruhi realisasi pencapaian indikator berupa peningkatan persentase obat yang Memenuhi Syarat.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik, dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem. Hal tersebut akan disampaikan kepada Kedepatian II dan Pusdatin.

Terbatasnya jumlah sampel yang beredar di lapangan, sementara jumlah yang dibutuhkan per item sampel targeted banyak, menyebabkan petugas kesulitan memperoleh sampel tersebut.

Belum terdapat Peraturan BPOM dan metode analisa untuk pengujian Obat Kuasi. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam penentuan parameter uji dan pengambilan kesimpulan hasil uji.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah mencapai target dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi". Hal - hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:

1. Reviu sampel yang sudah dilakukan penandaan sebelum terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label kosmetik.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.
3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten. Terhadap rekomendasi Tahun 2021 BBPOM di Jayapura telah mengirimkan permohonan *feedback* atas hasil evaluasi penandaan yang telah dikirimkan ke unit terkait.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk peningkatan capaian di tahun 2022, Balai Besar POM di Jayapura akan memberikan usulan kepada Direktorat terkait melalui Manajemen Representatif agar menetapkan batas waktu <i>feedback</i> terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT.	Telah mengirimkan permohonan <i>feedback</i> atas hasil evaluasi penandaan yang telah dikirim ke unit terkait		

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa

bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian.

Untuk Pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92,96	108,09	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 adalah 92,96% dari target 86% dengan capaian 108,09% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	66	79,23	120,04
	2021	85	89,34	105,11
	2022	86	92,96	108,09

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi mengalami kenaikan dengan tahun 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	92,96	105,64

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.5, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (77,5%) Kelima Balai sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2022, sampel *targeted* makanan yang masuk laboratorium sebanyak 141 sampel, 131 sampel (92,91%) Memenuhi Syarat dan 10 sampel (7,19%) Tidak Memenuhi Syarat Mutu. Parameter uji yang tidak Memenuhi Syarat adalah Deterjen, Siklamat, Formalin, Sakarin, E. coli, Coliform dan Angka Lempeng Total. Masih terdapatnya sampel makanan yang TMS disebabkan oleh penerapan CPPOB belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh industri.

Untuk produk yang dihasilkan industri pangan di Provinsi Papua telah ditindaklanjuti langsung pada sarana produksi. Untuk produk yang dihasilkan industri pangan di luar Provinsi Papua telah dilaporkan melalui SIPT.

Capain indikator ini didukung oleh kegiatan sampling makanan *targeted* telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten. Untuk menjamin indikator ini tetap tercapai di tahun 2023 akan dilakukan pengembangan kompetensi personel dan pemenuhan peralatan sesuai dengan parameter wajib pedoman sampling.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal – hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:

1. Reviu sampel yang sudah dilakukan penandaan sebelum terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label kosmetik.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.
3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi triwulan I sampai IV tahun 2021 telah dilakukan penyesuaian kriteria penilaian label. Dalam pelaksanaan sampling, meskipun persebaran sampel yang tidak merata, jenis dan jumlah sampel yang terbatas di setiap Kabupaten, BBPOM Jayapura tetap berupaya melaksanakan sampling sesuai Pedoman Sampling dan sampel telah diuji sesuai <i>timeline</i> .	Telah dilakukan sampling sesuai pedoman sampling dan telah diuji sesuai <i>timeline</i>		

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86,40	97,08	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah 86,40% dari target 89% dengan capaian 97,08% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	2020	-	-	-
	2021	88	94,17	107,01
	2022	89	86,40	97,08

Pada tahun 2020 belum terdapat indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, indikator ini baru muncul pada reviu Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

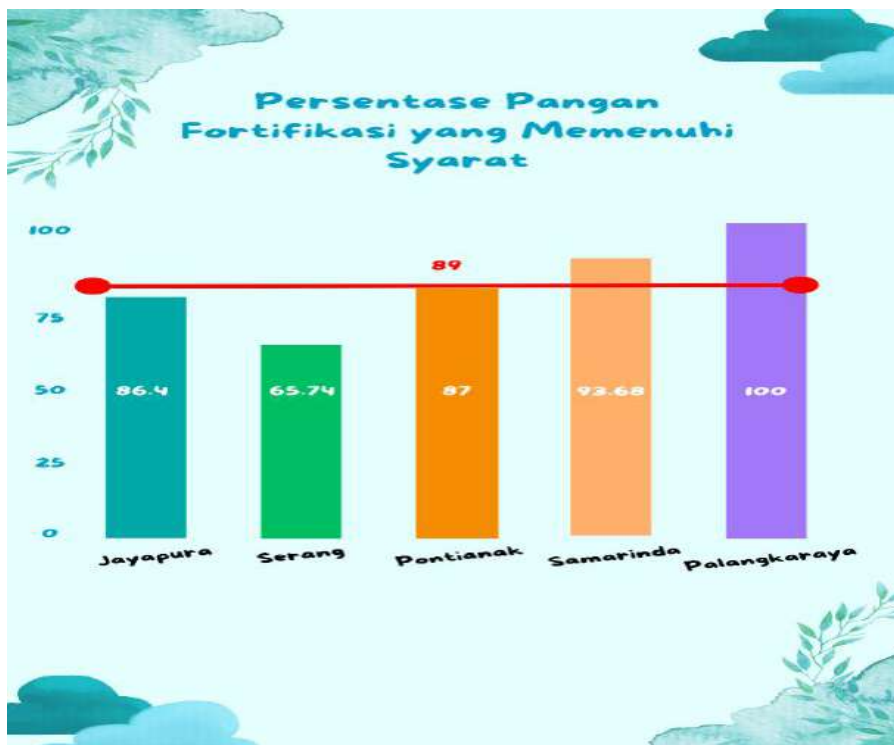
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	86,40	96,00

Realisasi kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, sehingga target renstra 2024 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.6, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (89%) BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya telah mencapai target nasional dan ketiga Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2022, dari 125 sampel fortifikasi yang masuk ke laboratorium, sebanyak 125 sampel telah selesai diuji, dengan hasil pengujian sebanyak 108 sampel

(86,40%) Memenuhi Syarat, 17 sampel (13,6%) Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 15 sampel garam dan 2 sampel minyak goreng. Adapun sampel fortifikasi yang disampling adalah garam dan minyak goreng. Sampel garam yang TMS adalah kurangnya kadar KIO_3 dalam produk. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya KIO_3 yang ditambahkan pada saat produksi atau kemasan yang Tidak Memenuhi Syarat serta tempat penyimpanan yang tidak sesuai (dalam ruangan yang panas). Sedangkan sampel minyak goreng yang Tidak Memenuhi Syarat adalah untuk parameter asam lemak bebas.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala antara lain terbatasnya jumlah, jenis, dan *batch* sampel fortifikasi. Demikian juga penentuan lokus sampel yang didasarkan pada tingginya angka stunting yang tidak bersesuaian dengan jumlah dan jenis sampel di daerah tersebut. Untuk periode berikutnya diharapkan sampling dapat dilakukan setidaknya pada tiga kabupaten.

Sampel fortifikasi sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral tertentu. Oleh karena itu tindak lanjut penanganan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sangat perlu dilakukan oleh UPT dimana produsen produk fortifikasi berada. Data yang dilaporkan dalam tindak lanjut dapat digunakan untuk menindaklanjuti sampel yang Tidak Memenuhi Syarat.

Kemungkinan sampel fortifikasi yg TMS disebabkan oleh:

- Faktor penyimpanan selama transportasi dari industri hingga ritel.
- Belum ada petunjuk penyimpanan dalam wadah dimana sebaiknya garam beryodium disimpan pada suhu yang tidak terlalu tinggi untuk menghindari penguapan yodium
- Sebagian kemasan garam beryodium terbuat dari bahan plastik.

Komunikasi dan koordinasi antar UPT terkait produk yang TMK, supaya jenis, merek dan produsen produk TMK tersebut tertelusur, dan selanjutnya dapat diintervensi dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

F. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum mencapai target dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi". Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah, jenis, dan *batch* sampel fortifikasi. Masih rendahnya kepatuhan sebagian industri menambahkan KIO_3 sesuai kadar yang ditetapkan dan pemahaman

pedagang/penjual garam yang menyimpan garam pada suhu ruangan yang panas yang berkontribusi pada belum tercapainya indikator ini.

Jumlah sampel yang banyak bahkan dibandingkan dengan UPT lainnya, sementara jenis sampel terbatas maka akan dilakukan Reviu target di tahun 2024.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan penelusuran sumber sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya melakukan intervensi sesuai dengan SOP dan melaporkan hasil pengujian melalui SIPT. Telah dilakukan juga perencanaan, pelaksanaan, monev sampling dan pengujian sampel fortifikasi secara berkala sesuai dengan pedoman sampling.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Untuk mencapai indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian sampel Fortifikasi secara berkala.	Telah dilakukan Monev secara berkala		

3.1.2 Sasaran Kegiatan II - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II 96,76% didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.36.209.110,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68	65,8	96,76	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura

Indeks kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambil keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun

Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *online* dan *offline*. Desain sampling

menggunakan *stratified random sampling*. Hasil survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.20 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	68	65,8	96,76	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 adalah 65,8 dari target 68 dengan capaian 96,76% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	2020	72	60,8	84,51
	2021	64	72,57	113,39
	2022	68	65,8	96,76

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi mengalami penurunan dengan tahun 2021 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	75	65,8	87,73

Realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sehingga target renstra 2024 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.7 Perbandingan ndeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.7, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Serang dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (80), kelima Balai yang diperbandingkan di Klaster 5, BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional dan keempat Balai lainnya sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan : manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo golongan pada kemasan obat
- b. Sikap : kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk
- c. Perilaku : menyimpan produk, produk aman dan bermutu, membaca label/kemasan/dus/brosur

Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 68, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 65,8 dari target 68 (96,76%) yang terdiri dari :

- a. Indeks Pengetahuan 63,63 (cukup baik); Pengetahuan tentang produk obat 68,71, pengetahuan tentang produk Obat Tradisional 57,51, pengetahuan tentang produk Suplemen Kesehatan 61,21, pengetahuan tentang kosmetika 60,26 dan pengetahuan tentang produk pangan 67,59.

- b. Indeks Sikap 75,82 (baik); Sikap tentang produk obat (76,23), sikap tentang produk Obat Tradisional 75,61, sikap tentang produk Suplemen Kesehatan 75,37, sikap tentang kosmetika 75,50 dan sikap tentang produk pangan 75,81.
- c. Indeks Perilaku 57,95 (kurang baik); Perilaku tentang produk obat (62,22), perilaku tentang produk Obat Tradisional 55,06, perilaku tentang produk Suplemen Kesehatan 56,28, perilaku tentang kosmetika 59,16 dan perilaku tentang produk pangan 56,12.

Untuk menjamin pencapaian target tahun 2022, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan serta secara khusus memperhatikan peningkatan pada Indeks Perilaku dan untuk komoditi adalah pada Komoditi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, antara lain :

1. Optimalisasi media informasi yang dimiliki dan bekerjasama media massa baik cetak maupun elektronik serta media luar ruang untuk melakukan publikasi berbagai program BBPOM maupun KIE dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sesuai kewilayahan (perkotaan atau pedesaan)
2. Meningkatkan kerjasama dengan influencer untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan oleh BPOM sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat dengan mudah diterima.
3. Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan usia dan platform media sosial
4. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya informasi untuk meningkatkan perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk, mengkonsumsi sesuai petunjuk penggunaan dan menyimpan sesuai petunjuk penyimpanan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan optimalisasi penggunaan media informasi untuk melakukan publikasi kegiatan dan pelaksanaan KIE yaitu melalui *talkshow* yang dilakukan di RRI Pro Dua Jayapura dan TVRI, telah dilakukan *Advanced Training* bagi petugas dan para Duta Kosmetik Aman BBPOM Jayapura agar para duta tersebut mampu menjadi *spokesperson* Badan POM dalam melakukan sosialisasi program dan edukasi bagi masyarakat/komunitasnya, membuat konten edukasi yang singkat dan menarik seperti SiKAT dan MATOA yang dipublikasikan pada platform media sosial TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube. Selain itu KIE secara langsung melalui kegiatan penyebaran informasi dan KASBI. KASBI merupakan salah satu program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana masyarakat

dibimbing secara langsung untuk mencari informasi yang valid tentang Obat dan Makanan, baik melalui pemanfaatan Aplikasi BPOM Mobile maupun dengan cara Cek KLIK langsung pada produk contoh yang dibawa oleh petugas. Pada Triwulan IV KASBI dilakukan sebanyak 3 kali yaitu di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Rekomendasi tindak lanjut laporan kinerja Tahun 2021 yaitu mengembangkan metode KIE agar semakin beragam dan mampu menjangkau masyarakat yang berada di daerah dengan akses terbatas telah dilakukan, namun indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target. Belum terpenuhinya indeks ini banyak dipengaruhi oleh Indeks Perilaku dengan kriteria capaian kurang baik yaitu 57,95. Belum tercapainya indikator ini menunjukkan masih ada masyarakat yang :

1. Membeli Produk dengan Kemasan yang Rusak
2. Belum Membaca Informasi pada Label Produk
3. Belum Menggunakan Produk sesuai dengan Aturan Pakai
4. Menyimpan Produk belum sesuai dengan Petunjuk Penyimpanan
5. Membeli Produk yang belum memiliki NIE
6. Belum Membaca Tanggal Kedaluwarsa Produk

Jika dikaitkan dengan indeks pengetahuan (kategori cukup baik) dan indeks sikap (kategori baik), masih rendahnya indeks perilaku yang berkontribusinya terhadap belum tercapainya indeks kesadaran disebabkan oleh belum terbangunnya kebiasaan/perilaku akan pentingnya Obat dan Makanan yang aman.

Survei yang telah dilakukan menjangkau hingga ke distrik, sementara jangkauan KIE dan pengawasan belum bisa menjangkau titik-titik survei (block sensus) tersebut. Demikian juga terbatasnya jangkauan jaringan internet yang menyebabkan materi KIE tidak sampai kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai target indikator pada periode berikutnya BBPOM di Jayapura akan melakukan diversifikasi materi KIE dan elektronik melalui media non elektronik (banner, leaflet) khususnya untuk daerah-daerah yang jaringan internetnya terbatas. Kerjasama dengan lintas sektor, serta perluasan cakupan wilayah publikasi juga akan ditingkatkan.

F. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2021, indikator ini telah mencapai target yaitu 113,39%. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pada tahun 2022, namun capaian di tahun 2022 tidak sesuai target. Program sudah dilakukan namun belum menjangkau semua daerah

yang menjadi objek survei, demikian juga kerjasama dengan lintas sektor yang belum sepenuhnya terbangun untuk mengubah perilaku masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi media informasi (radio lokal di Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Biak, videotron, media luar ruang, dll). Secara rutin menghadirkan *influencer*/Duta BPOM pada program KIE serta menyediakan dan menyesuaikan materi KIE baik KIE tidak langsung (infografis untuk sosialisasi di media sosial melalui TikTok, reklame, video edukasi) maupun untuk digunakan pada KIE langsung (pameran, penyuluhan, talkshow) dengan bahasa dan tampilan yang memperhatikan kearifan lokal daerah agar mudah dipahami masyarakat, serta meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Diharapkan pada tahun mendatang metode KIE yang dikembangkan oleh Balai Besar POM di Jayapura semakin beragam sehingga mampu menjangkau masyarakat yang berada di daerah dengan akses terbatas.	Telah dilakukan program KIE dengan menyediakan dan menyesuaikan materi KIE baik KIE tidak langsung (infografis untuk sosialisasi di media sosial melalui TikTok, reklame, video edukasi) maupun untuk digunakan pada KIE langsung (pameran, penyuluhan, talkshow) dengan bahasa dan tampilan yang memperhatikan kearifan lokal daerah		

3.1.3 Sasaran Kegiatan III - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian

sasaran kegiatan ketiga ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III 98,83% didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.191.763.750

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	94,50	102,38	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,51	63,40	95,32	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90,50	89,40	98,78	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			98.83	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan

pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3	94,5	102,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 adalah 94,5 dari target 92,3, dengan capaian 102,38% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2020	83,5	90,59	108,49
	2021	91,1	90,2	99,01
	2022	92,30	94,50	102,38

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2020 tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6	94,50	99,89

Realisasi indikator kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra Tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.8, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (89) seluruh Balai sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pendampingan/pembinaan salah satunya melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) secara intens telah dilakukan kepada pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota antara lain: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk mencapai target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, upaya yang dilakukan meliputi :

- Pendampingan, bimbingan teknis, desk, dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha dijadwalkan secara rutin
- Pendampingan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berintegritas
- Fasilitas yang memadai selama pendampingan
- *Feedback* yang cepat dan jelas dari petugas terhadap permintaan Informasi pelaku usaha

- Pendampingan dilakukan hingga tuntas.

Untuk meningkatkan capaian kepuasan pelaku usaha pada tahun anggaran berikutnya akan dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan frekuensi *desk* dan peningkatan kompetensi petugas.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program yang menunjang capaian keberhasilan indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan perencanaan kegiatan bimbingan teknis, *desk*, sosialisasi, dan pendampingan, konsistensi dalam pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Khusus untuk produksi pangan, jamu melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) dilakukan pendampingan intens terhadap pelaku usaha khususnya pengusaha asli Papua.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan sosialisasi program pendampingan dan pembinaan pelaku usaha distribusi dan produksi (SAGU PAPUA) yang intens melalui berbagai media, pendataan pelaku usaha, pendampingan jemput bola, meningkatkan kecepatan respon, peningkatan kompetensi petugas, dan program yang dilaksanakan secara terstruktur.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk merealisasikan indeks ini telah dilakukan sosialisasi secara intens melalui program SAGU PAPUA, melalui media sosial, pendampingan melalui peningkatan frekuensi dan kualitas <i>desk</i> , bimbingan teknis serta sosialisasi.	Telah dilakukan sosialisasi program pendampingan dan pembinaan pelaku usaha distribusi dan produksi (SAGU PAPUA) yang intens melalui berbagai media		

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,51	63,4	95,32	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 adalah 63,4 dari target 66,51 dengan capaian 95,32% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	2020	72	63,01	87,51
	2021	64,76	61,70	95,27
	2022	66,51	63,40	95,32

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020- 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,01	63,4	90,56

Realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan agar kepuasan masyarakat atas kinerja BBPOM di Jayapura dapat lebih tinggi dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.9, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Serang dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (77) BBPOM di Serang dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, sedangkan ketiga Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Reliability*, yaitu kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan

- b. *Assurance*, yaitu kemampuan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
- c. *Tangible*, yaitu layanan informasi tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan Layanan Halo BPOM, tampilan Website, Iklan/peringatan BPOM di media massa, Penyuluhan tentang keamanan Obat dan Makanan
- d. *Empathy*, yaitu kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman
- e. *Responsiveness*, yaitu tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat

Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 66,51, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 63,40 dari target 66,51 (95,32%) yang terdiri dari :

- a. Pengawasan 62,23
- b. Penindakan 63,95
- c. Pemberian Informasi 63,59
- d. Jaminan Keamanan 63,68

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat per kategori produk adalah sebagai berikut:

- a. Produk Obat 63,89
- b. Produk Obat Tradisional 63,07
- c. Produk Suplemen Kesehatan 63,01
- d. Produk Kosmetik 63,14
- e. Produk Pangan Olahan 63,39

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 belum mencapai target sehingga untuk menjamin pencapaian target tahun 2023, perlu dilakukan upaya-upaya :

1. Publikasi (liputan media massa) yang lebih luas tentang berbagai aktivitas BBPOM di Jayapura yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti

- pengawasan dan penindakan di bidang Obat dan Makanan terhadap produk yang kedaluwarsa, palsu, dan tidak memiliki izin edar. Pesan/tema utama yang akan disampaikan adalah BBPOM di Jayapura melindungi masyarakat di tanah Papua.
2. Menyusun konten/materi publikasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, langkah-langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan, informasi tentang dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tampilan yang menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Pada tahun 2022 telah dilakukan publikasi kegiatan pengawasan, penindakan, pendampingan UMKM dan KIE Pemberdayaan Masyarakat yang secara rutin telah dilakukan di sebagian besar wilayah pengawasan melalui media sosial, media cetak, media elektronik maupun website BBPOM di Jayapura. Selain itu dilakukan juga Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru serta Press Release Hasil Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal/Mengandung Bahan Berbahaya meliputi target aksi, hasil dan tindak lanjut serta lintas sektor yang terlibat.

Belum tercapainya target tahun 2022 disebabkan oleh terbatasnya jangkauan publikasi, dimana sebagian besar publikasi hanya menjangkau masyarakat perkotaan/ibukota Kabupaten. Sebagian masyarakat di luar ibukota Kabupaten belum memiliki akses informasi yang memadai dan *up to date*.

Untuk meningkatkan capaian indeks ini, akan dilakukan publikasi sesuai karakteristik wilayah dan melakukan diversifikasi materi publikasi kinerja melalui media non elektronik (*banner, leaflet*) khususnya untuk daerah-daerah yang jaringan internetnya terbatas. Kerjasama dengan lintas sektor, serta perluasan cakupan wilayah publikasi juga akan ditingkatkan.

F. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai indikator ini, antara lain :

1. Publikasi hasil pengawasan melalui TVRI, RRI, media cetak, dan media online
2. Penyebaran informasi melalui media sosial dan videotron
3. Publikasi melalui media online program-program BBPOM di Jayapura MATOA (Mari Tong Bicara)

Namun terdapat kendala dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu jangkauan publikasi dengan

berbagai media yang masih terbatas. Sebagian besar publikasi tersebut hanya dapat diterima masyarakat di perkotaan dan daerah dengan akses internet yang memadai melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan, masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron).

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi untuk mencapai indikator ini meliputi peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, penegak hukum lainnya, serta asosiasi pelaku usaha. Selain itu, meningkatkan publikasi tentang kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan BBPOM di Jayapura serta dalam pelaksanaannya memperhatikan karakteristik wilayah, media KIE dan target kelompok responden serta cakupan wilayah pelaksanaan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Rekomendasi untuk mencapai indikator ini meliputi Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, penegak hukum lainnya, serta asosiasi pelaku usaha. Selain itu, meningkatkan publikasi tentang kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan BBPOM di Jayapura serta dalam pelaksanaannya memperhatikan karakteristik wilayah, media KIE dan target kelompok responden serta cakupan wilayah pelaksanaan.	Telah dilakukan peningkatan publikasi tentang pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan		

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90,5	89,4	98,78	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 adalah 89,4 dari target 90,5 dengan capaian 98,78%. Capaian ini termasuk kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	2020	88	88,20	100,23
	2021	89,50	91,76	102,53
	2022	90,50	89,4	98,78

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi penurunan dari tahun 2021, sedangkan capain kinerja pada tahun 2022 mengalami penuruna dari tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	92	89,4	97,17

Realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan agar kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jayapura dapat lebih tinggi dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.10, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (89,45) BBPOM di Serang, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, dan kedua Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Jayapura;
 5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
- Hasil SKM akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga

kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan, sebagai berikut :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner bit.ly yang disebarakan kepada pengguna layanan BBPOM di Jayapura yang terdiri dari Layanan Pengujian Sampel dan

Layanan Informasi/Pengaduan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun dan dikoordinir oleh Inspektorat Badan POM.

Target SKM tahun 2022 adalah 90,5, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 89,40 (98,78%) yang terdiri dari : Persyaratan (83,91); Sistem, mekanisme dan prosedur (85,63); Waktu penyelesaian (89,66); Biaya/ tarif (90,80); Produk spesifikasi jenis pelayanan (90,80); Kompetensi pelaksana (91,95); Perilaku pelaksana (93,10); Penanganan pengaduan, sarana dan masukan (91,38); Sarana dan prasarana (87,36).

Berdasarkan hasil SKM 2022 dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Jayapura secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dan untuk tetap meningkatkan kepuasan masyarakat, pelaksanaan SKM pada tahun 2022 dilakukan per triwulan agar jika ada kekurangan/keluhan pada proses pelayanan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Pelaksanaan SKM tahun 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 01 Maret-14 Juni 2022 dengan hasil 89,40 (sangat baik). Responden yang mengisi survei adalah 65 orang. Nilai tertinggi hasil survei tahun 2022 adalah pada unsur perilaku pelaksana (93,10) sedangkan hasil survei dengan nilai terendah adalah pada unsur persyaratan pelayanan dan kesesuaian produk pelayanan (83,91). Dari penelaahan terhadap identitas responden yang memberikan nilai terendah adalah seluruhnya dari pelanggan pelaku usaha yang melakukan konsultasi untuk mendapatkan perijinan produk (nilai yang diberikan adalah 1 sampai 3; sangat tidak mudah sampai kurang mudah. Sedangkan untuk pelanggan pengujian sampel seluruhnya memberikan nilai maksimal pada seluruh unsur survei (nilai 5 dan 6; mudah sampai sangat mudah).

Untuk pencapaian indikator ini akan dilakukan peningkatan kualitas Forum Konsultasi Publik, identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus, serta melakukan upaya peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam hal *customer handling*.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu:

1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017
2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap

3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNBP, Aplikasi Noken untuk tracking hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survey kepuasan pelanggan)
4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM
5. SDM dan sarana penunjang pelayanan publik.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Berdasarkan rekapitulasi saran yang disampaikan oleh responden disimpulkan bahwa rendahnya hasil Indeks Layanan Informasi dan Pengaduan disebabkan oleh pemahaman yang keliru dari responden. Secara khusus untuk responden yang menerima informasi/berkonsultasi terkait proses perijinan/registrasi obat dan makanan, terhadap pertanyaan kemudahan mendapatkan layanan/persyaratan layanan dengan persyaratan teknis perijinan/registrasi Obat dan Makanan. Dimana terdapat responden yang memberikan jawaban tentang persyaratan teknis perijinan/registrasi Obat dan Makanan adalah sulit, bukan memberikan jawaban tentang kemudahan mendapat layanan.

Untuk itu akan dilakukan upaya perbaikan, yaitu peningkatan kualitas Forum Konsultasi Publik (FKP) dan melakukan identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian/pendampingan khusus.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri setiap triwulan agar jika ada kekurangan/keluhan pada proses pelayanan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri		

3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari ketujuh indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 104,03% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.708.548.807 dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,06 (Efisien). Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.33 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98,08	108,98	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana produksi Obat dan	60	66,20	110,33	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
	Makanan yang Memenuhi Ketentuan				
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	79	79,40	100,51	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura	4,4	4,24	96,36	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103,90	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata				104,03	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah (a+b+c+d) dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98,08	108,98	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 98,08% dari target 90% dengan capaian 108,98% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	87	89,73	103,14
	2021	89	95,77	107,61
	2022	90	98,08	108,98

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

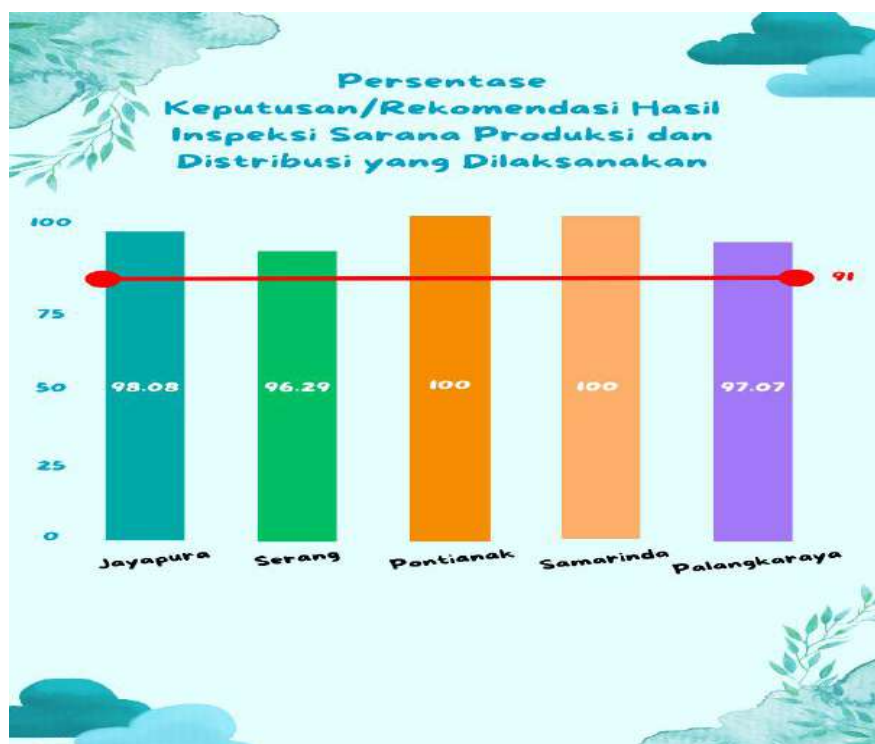
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	98,08	106,61

Realisasi kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.11, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Samarinda sedangkan yang terendah BBPOM di Serang. Terhadap target nasional (91%) seluruh Balai sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2022, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 186 keputusan/rekomendasi dari 189 keputusan/rekomendasi yang diterima yang terdiri dari:

1. keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Tindak Lanjut 162 dari 164 (98,78%) rekomendasi.
2. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh tindak lanjut 21 dari 22 (95,45%) rekomendasi
3. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain tindak lanjut 3 dari rekomendasi 3 (100%)
4. rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (0%)

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun di tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108,98%. Capaian persentase ini didukung oleh:

- data tindak lanjut yang selalu *up date*
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan
- komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan lainnya

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023 akan dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens ke Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung oleh:

1. Rapat monitoring evaluasi internal secara rutin
2. Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan

Dalam pencapaian indikator ini juga terdapat kendala, dimana sebagian Dinas Kesehatan kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT).

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi telah dilakukan secara intens, demikian juga advokasi dilakukan secara rutin sehingga koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk mempertahankan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Jayapura melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Badan POM, UPT lain dan pemangku kepentingan terkait pelaporan hasil pemeriksaan Balai Besar POM Jayapura yang memerlukan tindak lanjut dari pusat.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala		

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana

distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu $(a+b)$ dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari:

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 adalah 58% dari target 57% dengan capaian 101,75% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	55	46,98	85,42
	2021	55	64,39	117,07
	2022	57	58	101,75

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi penurunan dengan tahun 2021, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan kenaikan jika dibandingkan dan 2020 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61	58	95,08

Realisasi Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.12, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (65%) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Serang, dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional, dan kedua Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2022 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 132 dari 151 rekomendasi dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 6 dari 21 rekomendasi.

Capaian indikator ini didukung oleh:

- Sampai dengan bulan Desember 2022, BBPOM di Jayapura telah melakukan inspeksi di seluruh Kabupaten yang merupakan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten

Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Supiori. Inspeksi ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi meliputi sanksi administratif peringatan, peringatan keras terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

- Komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.
- memastikan setiap surat yang dikirim telah diterima oleh sarana melalui pengiriman surat elektronik kepada pimpinan/penanggung jawab sarana mengingat sebagian daerah tidak memiliki akses/kantor pos yang memungkinkan fisik surat (*hardcopy*) tersebut dapat diterima
- Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah yang berjalan dengan baik dalam hal melakukan tindak lanjut/monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian
- Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dalam melakukan inspeksi bersama

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023 akan dilakukan komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam memberikan respon, khususnya ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru. Selain itu, akan dilakukan komunikasi yang lebih intens dengan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT).

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mencapai keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung oleh:

1. Adanya kegiatan monev rutin yang dilakukan, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jayapura (Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan, Pelaksanaan DAK).

2. Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait
3. Bimbingan teknis kepada penanggung jawab kefarmasian Kabupaten/Kota
4. Intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait
5. Komunikasi dan koordinasi dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia dalam hal proses tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan sarana kefarmasian

Dalam pencapaian indikator ini masih terdapat kendala khususnya belum optimalnya sebagian Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Monitoring yang intens terhadap pelaksanaan DAK sudah dilakukan sehingga pelaksanaan DAK Tahun 2022 berjalan sesuai target yang diberikan.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor, serta komunikasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan feedback/perbaikan atas hasil pemeriksaan sarana. Demikian juga monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, untuk sarana yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan akan dilakukan intervensi lebih lanjut.	Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor		

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara:

jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 adalah 100% dari target 94% dengan capaian 106,38% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	92	108,24
	2021	92	100	108,70
	2022	94	100	106,38

Realisasi kinerja pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

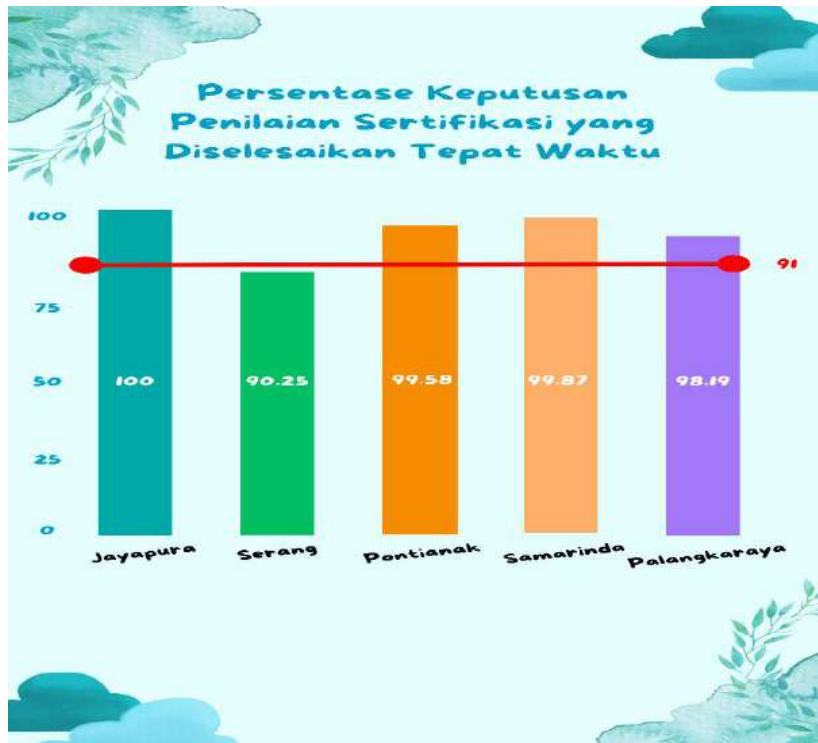
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103,09

Realisasi kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.13, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (91%) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional, dan BBPOM di Serang belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan bulan Desember, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai upaya agar sarana dapat tersertifikasi tepat waktu. Sarana tidak hanya diperiksa, namun juga didampingi secara intens dalam proses perbaikan temuan (CAPA). Petugas terus melakukan monev dan rutin mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi. Sekalipun masih dalam masa pandemi, seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilakukan secara *on site*. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha benar-benar memahami penjelasan petugas, dan pelaku usaha merasakan

dampak yang lebih baik. Di sisi lain, pemeriksaan secara *on site* dilakukan agar petugas benar-benar dapat melihat secara komprehensif kondisi di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi secara lengkap dan terbangun komunikasi yang lebih efektif antara petugas dan pelaku usaha.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga seluruhnya sesuai *timeline*. Hal ini didukung oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian sampel dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat.

Pengawasan indikator ini dilakukan secara intens sebagai bentuk komitmen BBPOM Jayapura dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk peningkatan capaian indikator ini akan dilakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, koordinasi dan dukungan dengan lintas sektor terkait kegiatan sertifikasi di bidang obat dan makanan, kompetensi dan komitmen ASN BBPOM di Jayapura dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi di bidang obat dan makanan.

Secara khusus untuk sampel pihak ketiga, selain monitoring dan evaluasi yang rutin, komunikasi dan koordinasi antar substansi di BBPOM Jayapura berjalan dengan baik.

Untuk pencapaian indikator ini, masih perlu ditingkatkan kompetensi pimpinan/penanggung jawab sarana dalam hal pemahaman terkait syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi sehingga sertifikasi dapat diselesaikan lebih cepat.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Terhadap kendala kurangnya pemahaman kompetensi penanggung jawab sarana yang disertifikasi telah dilakukan komunikasi dan pendampingan secara intens, baik secara *on site* maupun secara online. Demikian juga, setiap permasalahan yang disampaikan oleh penanggung jawab/pelaku usaha selalu direspon dengan cepat, lengkap, dan tuntas oleh petugas.

Pada tahun 2021 BBPOM Jayapura telah aktif melakukan pendampingan secara langsung ke lapangan maupun secara online. Sarana yang sudah didampingi terus di monev dan rutin diingatkan agar melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi. Terkait proses perijinan juga telah dikomunikasikan kepada pemerintah kabupaten saat dilakukan TAHUBJA. Segera melakukan PSB (Pemeriksaan Sarana Baru) setelah menerima permohonan, dan secara aktif melakukan pendampingan supaya semua persyaratan terpenuhi sehingga sertifikat terbit sesuai *timeline*.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendampingan pelaku usaha dengan berorientasi pelayanan dengan sepenuh hati, monitoring dan evaluasi progress sertifikasi secara intens, serta koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor dan komunikasi kepada pelaku usaha. Masih terdapat kendala pemenuhan persyaratan terutama bangunan oleh pelaku usaha sehingga sebagian proses sertifikasi terhambat, dalam hal ini dukungan pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan. Koordinasi dan komunikasi yang intens akan dilakukan kepada pemerintah daerah.	Telah dilakukan pendampingan pelaku usaha secara langsung ke lapangan maupun secara <i>online</i>		

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (OIT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) Per BPOM No.19 tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.

- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
- 4) Keputusan Kepala Badan POM NO. HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	66,20	110,33	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 adalah 66,20% dari target 60% dengan capaian 110,33% dengan kriteria **Memenuhi Ketentuan**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	2020	46	48,75	105,98
	2021	55	53,49	97,25
	2022	60	66,20	110,33

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

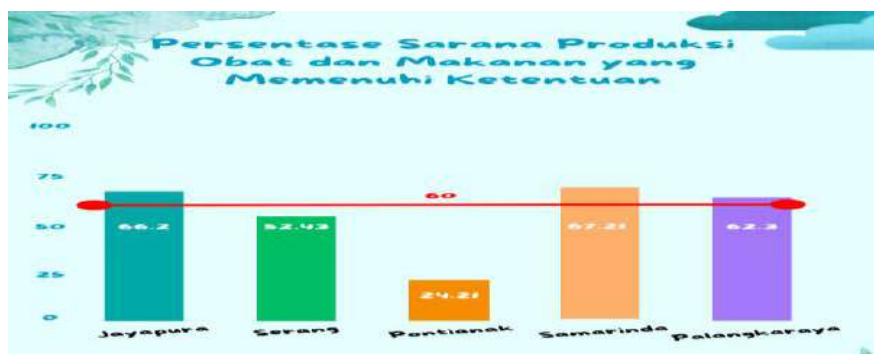
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020- 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	70	66,20	94,57

Realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.14, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Samarinda dan yang terendah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (60%), BBPOM di Jayapura, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional dan kedua Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Industri Pangan sebanyak 20 (dua puluh) sarana dengan hasil 17 (tujuh belas) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 (tiga) sarana TMK, dan 1 (satu) sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Memenuhi Ketentuan.

85% sarana produksi pangan MD telah memenuhi ketentuan, hal tersebut didukung oleh:

- Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang semakin meningkat akan pentingnya penerapan CPPOB
- Konsistensi petugas pada saat pemeriksaan sarana secara on site, dimana selain melakukan pemeriksaan, petugas juga melakukan pembinaan
- Konsistensi pelaksanaan pemberian sanksi administratif (peringatan, peringatan keras) dan pengawalan tindak lanjut temuan (penyelesaian CAPA)

Telah beroperasinya 1 (satu) sarana UMOT di Papua merupakan terobosan di bidang produksi Obat Tradisional. Agar penerapan CPOTB pada UMOT tersebut berjalan secara konsisten, petugas BBPOM Jayapura secara aktif melakukan pendampingan dan pembinaan, sehingga hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan.

Sedangkan Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 50 (lima puluh) sarana dengan hasil 29 (dua puluh sembilan) sarana Memenuhi Ketentuan dan 21 (dua puluh satu) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana yang TMK masih tinggi yaitu 42%. Angka TMK yang tinggi tersebut masih merupakan trend hasil pengawasan periode sebelumnya. Aspek dominan penyebab TMK adalah rendahnya sanitasi dan hygiene serta sistem dokumentasi yang belum memadai. Pada setiap pemeriksaan sarana, petugas selain melakukan pemeriksaan aspek-aspek CPPOB-IRT, petugas juga melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha agar memperhatikan seluruh aspek produksi pangan industri rumah tangga yang baik. Terhadap sarana yang TMK telah diberikan tindak lanjut berupa rekomendasi peringatan melalui

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sarana dengan kriteria TMK dengan persentase yang masih besar disebabkan oleh:

- Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah
- Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya ditindak lanjuti
- Sanksi administratif yang tidak membuat efek jera

Secara keseluruhan, indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah melebihi target. Namun, perlu upaya lebih sistematis dan sinergis bersama pemerintah daerah khususnya untuk penanganan industri Pangan Rumah Tangga, berupa desk hasil pengawasan, pengawalan tindak lanjut rekomendasi, dan pengawalan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM Tahun Anggaran 2023.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain: perencanaan pemeriksaan yang matang, pemeriksaan *on site* yang disertai dengan pembinaan langsung, penerbitan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai SOP, monitoring dan evaluasi capaian secara rutin, serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu belum optimalnya tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha, sebagian disebabkan oleh terbatasnya modal untuk perbaikan fasilitas/sarana produksi. Di sisi lain, belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BBPOM di Jayapura.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pembinaan dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan produksi. Petugas juga aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha agar temuan hasil pemeriksaan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Komunikasi, koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas

Kesehatan, intens dilakukan baik dalam hal penerapan CPPOB-IRT, juga monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk saran berupa pemberian sanksi yang lebih tegas kepada IRTP yang melakukan pelanggaran berulang. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha hingga tuntas.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha produksi serta koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura dilakukan juga evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh sarana. Masih terdapat beberapa kendala yang dialami pelaku usaha diantaranya adalah belum memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Hal ini disebabkan dinas terkait tidak memiliki program pelatihan PKP karena terbatasnya anggaran. Sehubungan dengan program DAK POM tahun 2022 hanya diperuntukkan untuk 1 (satu) Kota dan 1 (satu) Kabupaten diharapkan stake holder terkait yang telah mendapatkan pelatihan PKP DFI dapat mengaplikasikan hasil pelatihan kepada pelaku usaha yang baru. BBPOM di Jayapura akan aktif melakukan asistensi terhadap stake holder terkait.	Telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha produksi serta koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah		

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.
- b) Peraturan BPOM No.21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- c) Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
- d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- e) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- f) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Sarana Distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distryang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	79	79,40	100,51	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 adalah 79,40% dari target 79% dengan capaian 100,51% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	2020	55	76,40	138,41
	2021	76	73,33	96,49
	2022	79	79,40	100,51

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sedangkan capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2020 tetapi mengalami kenaikan dengan tahun 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

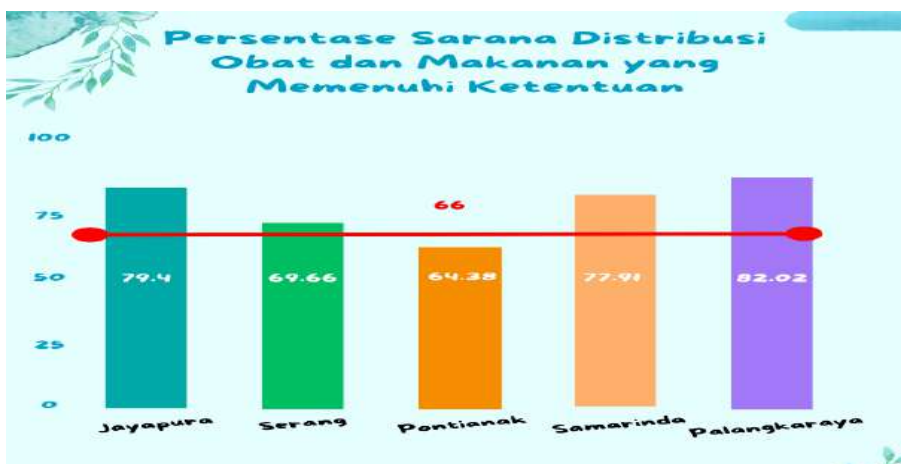
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	85	79,40	93,41

Realisasi kinerja indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.15, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (66%), BBPOM di Jayapura, BBPOM di Serang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional dan BBPOM Pontianak belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, dari 932 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 740 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 192 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) 28 sarana (26 MK, 2 TMK)
- Apotek 171 sarana (150 MK, 21 TMK)
- Toko Obat 23 sarana (16 MK, 7 TMK)
- Instalasi Farmasi 20 sarana (16 MK, 4 TMK)
- Rumah Sakit 26 sarana (22 MK, 4 TMK)
- Puskesmas 74 sarana (68 MK, 6 TMK)
- Klinik 24 sarana (16 MK, 8 TMK)

- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 26 sarana (24 MK, 2 TMK)
- Fasilitas Distribusi Kosmetik 148 sarana (72 MK, 76 TMK)
- Klinik Kecantikan 5 sarana (2 MK, 3 TMK)
- sarana peredaran pangan olahan 387 sarana (328 MK, 59 TMK)

Realisasi pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh:

- Cakupan pengawasan telah dilakukan di seluruh Kabupaten yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Jayapura, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya.

Pengawasan tersebut dilakukan di tengah-tengah kondisi beberapa Kabupaten yang kurang kondusif keamanannya.

- Perencanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan baik
- Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara konsisten sesuai dengan SOP dan pedoman tindak lanjut
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan (TPP/CAPA) yang dilakukan oleh sarana
- Koordinasi dan advokasi secara intens dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), khususnya untuk sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian

Secara umum, temuan pada sarana distribusi kefarmasian, khususnya Instalasi Farmasi Kabupaten, antara lain:

- Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan vaksin belum memadai, contohnya belum memiliki generator, termometer belum terkalibrasi, *chiller* dalam kondisi rusak
- Belum semua penanggungjawab instalasi farmasi adalah tenaga apoteker
- Administrasi pengelolaan sediaan farmasi belum tertib

Temuan umum pada sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, Toko Obat), antara lain:

- Penanggungjawab tidak selalu hadir pada jam pelayanan
- Masih ditemukan pengadaan obat dari sumber yang tidak resmi
- Terdapat sarana yang belum memiliki penanggungjawab
- Apotik dan Klinik menjual obat keras di luar Daftar Obat Wajib Apotik (DOWA) tanpa resep dokter
- Administrasi pengelolaan sarana farmasi belum tertib
- Toko Obat menjual obat keras

Sedangkan temuan pada sarana distribusi pangan dan kosmetik, yaitu :

- Masih ditemukan kosmetik tanpa izin edar. Pada tahun 2022, persentase temuan kosmetik tanpa izin edar termasuk besar yaitu 51,35% dari total sarana kosmetik yang diperiksa.
- Masih ditemukan pangan kedaluwarsa, khususnya pada sarana distribusi pangan tradisional

Dalam pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Terbatasnya jumlah apoteker pada beberapa kabupaten untuk menjadi penanggungjawab kefarmasian
- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan fasilitas distribusi/pelayanan kefarmasian, termasuk penambahan SDM farmasi, pengadaan peralatan dan sarana prasarana lainnya
- Terbatasnya sanksi yang dapat diberikan kepada sarana distribusi/pelayanan kefarmasian milik pemerintah
- Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait dengan keamanan, mutu, dan manfaat Obat dan Makanan, khususnya pangan dan kosmetik. Potensi ekonomi yang besar menyebabkan masih maraknya penjualan kosmetik tanpa izin edar (TIE)

Untuk pencapaian indikator ini, pada periode berikutnya akan dilakukan:

- Pengawasan secara komprehensif berbasis risiko
- Penguatan tim terpadu pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan di daerah
- Monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya pemberian tindak lanjut kepada sarana dan umpan balik berupa CAPA dari sarana yang diperiksa

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

- pelaksanaan pemeriksaan sarana dilakukan secara konsisten dan menjangkau seluruh wilayah kerja
- monitoring dan evaluasi secara rutin realisasi indikator kinerja
- advokasi komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah.
- Perjanjian kerja sama dengan organisasi profesi Pengurus Daerah IAI Provinsi Papua yang secara rutin menindaklanjuti hasil pemeriksaan pada sarana pelayanan dan distribusi.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pembuatan tindak lanjut sesuai SOP dan pedoman tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi secara rutin.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pengawasan berbasis resiko atau <i>risk based inspection</i> dimana sarana sarana dengan <i>track record</i> hasil pengawasan Tidak Memenuhi Ketentuan menjadi prioritas pemeriksaan dan dilakukan monitoring secara berkala, serta meningkatkan sinergitas dengan lintas sektor terkait. BBPOM di Jayapura akan aktif melakukan asistensi terhadap <i>stake holder</i> terkait khususnya kepada petugas yang telah mengikuti pelatihan yang menggunakan DAK POM	Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pembuatan tindak lanjut sesuai SOP dan pedoman tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi secara rutin		

6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,51 – 2,00	D	Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4,4	4,24	96,36	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 adalah 4,24 dari target 4,4 dengan capaian 96,36% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	2020	3,51	4,08	116,24
	2021	4,20	4,33	103,10
	2022	4,4	4,24	96,36

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi mengalami penurunan dengan tahun 2021, sedangkan capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4,5	4,24	94,22

Realisasi kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.16, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Serang dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (4,28), BBPOM di Serang, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional dan kedua Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Tahun 2022 adalah sebesar 4.26 (96,36%) dengan uraian sebagai berikut:

- Kebijakan Pelayanan : 3,93
- Profesionalitas SDM : 4,86
- Sarana Prasarana : 4,79
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) : 4,58
- Konsultasi dan Pengaduan : 3,38
- Inovasi : 4

Untuk pencapaian indikator ini telah dilakukan berbagai upaya yaitu:

- Melakukan revisi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat pertriwulan
- Melakukan publikasi sarana konsultasi yang dimiliki (sarangsemut, WA, email, nomor telepon ULPK) melalui beberapa media antara lain berupa leaflet, media sosial dan subsite.
- Melakukan publikasi hasil pengelolaan pengaduan melalui beberapa media antara lain berupa leaflet, media sosial dan subsite

Aspek yang masih sangat perlu ditingkatkan yaitu konsultasi pengaduan, kebijakan pelayanan, dan inovasi. Masih rendahnya ketiga aspek tersebut disebabkan oleh:

1. Belum melakukan publikasi media konsultasi yang dimiliki (sarangsemut, WA, email) dan hasil pengelolaan pengaduan melalui berbagai media antara lain berupa leaflet, baliho, media sosial dan subsite.
2. Belum melakukan pembaharuan standar pelayanan dengan memanfaatkan pengaduan serta dipublikasikan melalui berbagai media. Untuk mendapatkan masukan masyarakat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan dievaluasi setiap bulan dengan responden seluruh penerima layanan informasi/pengaduan dan pengujian sampel

Untuk pencapaian indeks pelayanan publik pada tahun 2023 akan dilakukan :

- 1) Memperbaiki publikasi Standar Pelayanan yang memuat 6 komponen *service delivery* dalam bentuk baliho dan media cetak, pada ruang layanan, subsite dan medsos
- 2) Menambahkan data dukung berupa publikasi maklumat yang mutakhir (media cetak, baliho).
- 3) Melakukan SKM mandiri setiap bulan dan dituangkan dalam laporan SKM per bulan dan mempublikasikan hasilnya
- 4) Menambahkan informasi pada subsite BBPOM di Jayapura terkait pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan.
- 5) Menambahkan media konsultasi pada subsite (WA dan LAPOR) Membuat SK petugas khusus difabel
- 6) Menambahkan informasi pengelolaan konsultasi di subsite
- 7) Membuatkan buku FAQ layanan konsultasi di ruang layanan publik dan subsite
- 8) Menambahkan data dukung arsip manual layanan konsultasi dan rekapannya dipublikasikan

Selain itu, dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPOM melakukan penyesuaian instrumen evaluasi internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PANRB tersebut.

Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi :

- a. Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
- b. Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
- c. Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online.

Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM dimana perubahan target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2023 dari semula 4,51 menjadi 4,25 dan tahun 2024 semula 4,55 menjadi 4,5.

F. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Belum tercapainya indikator indeks pelayanan publik disebabkan oleh belum melakukan publikasi kebijakan layanan melalui media baliho dan belum menambahkan informasi terkait pengelolaan dan pengaduan pada subsite BBPOM di Jayapura.

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- 1) Telah dilakukan pelatihan *Service Excellence* untuk petugas pelayanan publik
- 2) Telah dilaksanakan review standar pelayanan, Publikasi saluran penyampaian Informasi dan Pengaduan melalui *SMS Blast*
- 3) Telah dilakukan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Secara rutin melakukan reviu standar pelayanan dan Forum Konsultasi Publik, melengkapi sarana dan prasarana serta terus mengembangkan aplikasi NOKEN sebagai upaya pemutakhiran informasi pelayanan.	Telah dilakukan reviu standar pelayanan		

7. Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

- Ruang Lingkup UMKM

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil :
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - b) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumenstasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi

pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara bertahap.

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - ✓ Persetujuan denah (sesuai petunjuk teknis penyusunan denah bangunan industri kosmetik golongan B)
 - ✓ Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) (sesuai petunjuk teknis penerbitan SPA CPKB dan CPKB.
 - ✓ Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai petunjuk teknis penerbitan nomor notifikasi kosmetik.
 - ✓ Penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

- Kriteria UMKM yang didampingi :

- Untuk UMKM pangan mengacu pada pedoman pendampingan penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
- Untuk UMKM OT :
 - ✓ UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan/atau sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
 - ✓ UMKM yang memproduksi Obat Tradisional.
 - ✓ UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up).
 - ✓ UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
 - ✓ UMKM yang direkomendasikan oleh lintas sektor
- Untuk UMKM Kosmetik :
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

a. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	

5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
----	------------------------------------	--	----	--

3. Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103,90	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 adalah 80% dari target 77% dengan capaian 103,90% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2020	Indikator baru pada tahun 2022		
	2021	Indikator baru pada tahun 2022		
	2022	77	80	103,90

Capaian indikator pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	80	98,77

Realisasi kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.17, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Pontianak dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (77%), BBPOM di Jayapura, BBPOM di Serang, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional dan BBPOM di Palangkaraya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah:

- a. Sosialisasi yang intens melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan website, bahwa BBPOM di Jayapura melakukan pendampingan UMKM di

- bidang produksi pangan olahan, OT dan kosmetik melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua).
- b. Melakukan pendataan UMKM melalui komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk program Prioritas Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), melalui media promosi/pameran, dan berdasarkan produk yang beredar di lapangan
 - c. Membangun komunikasi dengan UMKM yang akan dibina dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara berkala kepada UMKM yang berkomitmen untuk didampingi
 - d. Melakukan pendampingan secara on site untuk melihat kondisi riil sarana dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana yang didampingi

Dalam pencapaian indikator ini, terdapat kendala yaitu keterbatasan modal usaha khususnya dalam pemenuhan persyaratan sarana prasarana agar memenuhi standar CPOOB/CPOTB/CPKB. Hal tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masih rendahnya sinergitas antar institusi dalam pelaksanaan pendampingan, dimana beberapa institusi telah melakukan pendampingan secara parsial namun belum dikoordinasikan dengan BBPOM di Jayapura, sehingga pelaku usaha yang didampingi belum mendapatkan izin edar.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, akan dimaksimalkan sosialisasi inovasi sarangsemut dan SAGU Papua, agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yang diinginkan, serta mendapatkan pendampingan jemput bola hingga produknya mendapatkan izin edar. Demikian juga, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya akan ditingkatkan.

F. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah adanya program pendampingan jemput bola kepada semua UMKM sektor produksi Obat dan Makanan yang telah terdata melalui SAGU Papua, kompetensi petugas yang mumpuni dalam memberikan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha (rekomendasi triwulan I sampai dengan triwulan III)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi progress pendampingan terhadap pelaku usaha.	Telah dilakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha		

3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 101,20% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.536.934.029,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	93,33	101,23	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	58	103,57	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah desa pangan aman	13	13	100	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata				101,20	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	93,33	101,23	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 93,33 dari target 92,2 dengan capaian 101,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	86,95	89,63	103,08
	2021	90,5	93,31	103,10
	2022	92,2	93,33	101,23

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, tetapi capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

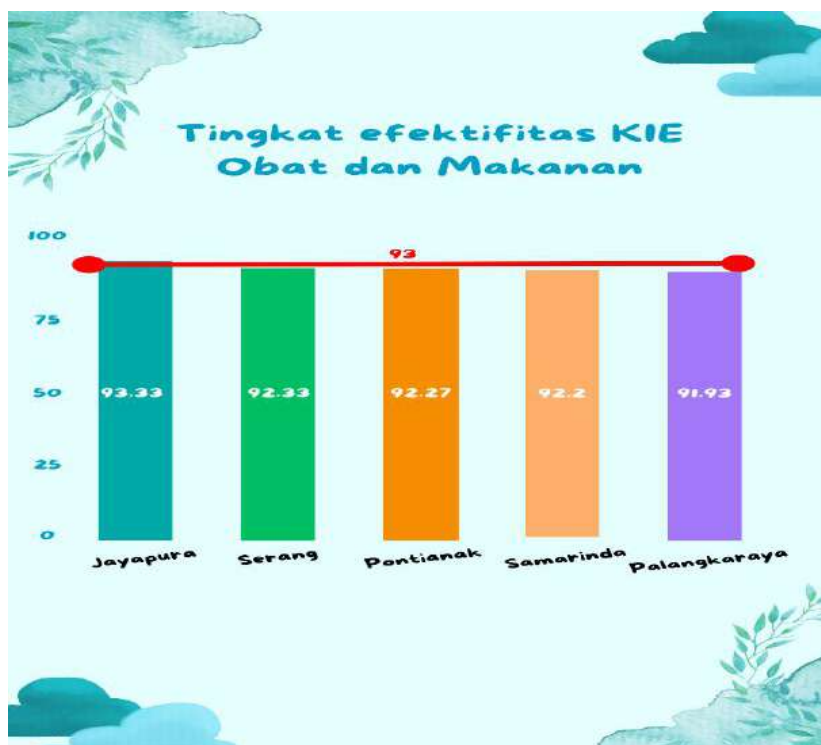
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96	93,33	97,22

Realisasi kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.18, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (93), BBPOM di Jayapura sudah mencapai target nasional dan keempat Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Tingkat Efektifitas KIE pada tahun 2022 adalah 101,18%. Pada tahun 2022 telah diselenggarakan kegiatan Kami Siap Berbagi Informasi (KASBI). KASBI merupakan program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana pada pelaksanaannya selain pemberian informasi juga dilakukan praktek langsung untuk mengenali produk Obat dan Makanan yang Aman baik melalui aplikasi BPOM Mobile maupun melalui contoh produk yang dibawa petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan penyebaran

informasi kepada masyarakat melalui talkshow TVRI dan RRI. Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan di atas sebagai berikut :

- Ragam Kegiatan (92,23)
- Pemahaman (96,25)
- Manfaat (93,78)
- Minat (87,97)

Peserta dapat memahami dengan sangat baik materi yang disampaikan hal ini terjadi karena disamping penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta, diberikan juga contoh secara langsung melalui contoh produk yang dipajang serta demo penggunaan aplikasi BPOM Mobile.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Kompetensi petugas yang memadai
- Sikap dan keramahan petugas saat memberikan KIE
- Materi yang menarik dan mudah dipahami

Masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan yaitu pada aspek minat (87,97%). Untuk meningkatkan minat, maka akan dikembangkan strategi KIE yang lebih efektif.

Masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini, antara lain :

1. Jangkauan materi publikasi melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan
2. Masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron)
3. Biaya transportasi yang cukup tinggi untuk pengiriman materi publikasi barang cetakan
4. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang memberikan minat/perhatian terhadap materi KIE.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan KASBI pada event-event daerah yang melibatkan masyarakat banyak. Selain materi yang menarik, petugas yang kompeten juga dengan pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM.

G. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil Evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Peningkatan kegiatan KIE dilakukan pada tahun 2022. Selain KASBI, penyebaran informasi secara intens juga dilakukan dengan program Si-KAT, Matoi, dan informasi/kegiatan Badan POM/BBPOM Jayapura melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Demikian juga melalui media cetak, media online, dan media elektronik. Si-KAT (informaSI SingKAT) merupakan program edukasi baru di tahun 2022 yang mendapat atensi besar dari masyarakat.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	BBPOM di Jayapura berupaya terus dalam melakukan KIE kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman. Pada daerah kabupaten publikasi kegiatan akan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, misalnya melalui RRI setempat. menggunakan metode dan topik yang sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta dan kondisi. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE. Peningkatan penggunaan seluruh media sosial (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube dan Tiktok) serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan konten edukasi dengan topik tertentu pada waktu tertentu.	Telah dilakukan peningkatan kegiatan KIE baik secara langsung atau menggunakan media elektronik		

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.59 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	58	103,57	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2022 adalah 58 dari target 56 dengan capaian 103,57% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	16	16	100

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	2021	40	47	117,5
	2022	56	58	103,57

Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Target pada indikator ini ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	58	65,91

Realisasi kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dikarenakan target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru tercapai diakhir periode renstra tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.19, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Samarinda dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Realisasi indikator ini sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing Balai, begitupun terhadap target

nasional (2010) yang merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target jumlah sekolah dengan PJAS Aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 16 sekolah pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Pencapaian sekolah yang diintervensi adalah 18 sekolah, masing-masing Kabupaten Jayawijaya 9 sekolah, kabupaten Biak Numfor 6 sekolah, dan kabupaten Nabire 6 sekolah. Sedangkan target pengawalan adalah 21 sekolah yang telah disertifikasi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah sekolah dengan PJAS Aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Maret - April/TW I - TW II); Skor 10%
3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (April - Juni/TW II- TW III); Skor 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan (April - Nopember/TW II - TW IV); Skor 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (Juli - September/TW III - TW IV); Skor 15%
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Agustus - Nopember/TW III - TW IV); Skor 20%
7. Pengawalan (Oktober - Desember/TW IV) ; Skor 10%

Pada tahun 2022 telah dilakukan seluruh tahapan (tujuh tahap) Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di seluruh kabupaten lokus. Telah dilakukan juga monitoring dan evaluasi program yang bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program, mengidentifikasi hal-hal yang mendukung/menghambat pelaksanaan program, mengukur capaian target yang telah ditetapkan, serta memperoleh program rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan piagam

penghargaan kepada sekolah yang telah bekerjasama dengan baik serta diserahkan juga paket *test kit* pengujian empat bahan berbahaya, yang diharapkan dapat digunakan secara mandiri oleh pihak sekolah untuk pengujian pangan jajanan di sekolah.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan pihak sekolah
- Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah untuk mengikuti seluruh tahapan PJAS
- Komitmen yang tinggi dari petugas melaksanakan seluruh tahapan, dimana beberapa sekolah tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan program PJAS, namun karena keterbatasan jumlah sekolah, program tersebut tetap dilaksanakan berbagai upaya agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam keberlanjutan indikator ini antara lain:

- Pemerintah daerah belum menyatakan komitmen nyata untuk mereplikasi program ini di tahun berikutnya
- Sebagian besar sekolah belum memiliki kantin dengan fasilitas yang sesuai standar
- Sebagian besar sekolah memiliki inisiatif yang rendah dalam melaksanakan program PJAS secara mandiri

Program PJAS yang telah berjalan di tahun 2022 diharapkan dapat dijalankan secara mandiri oleh sekolah yang telah diintervensi, dan untuk meningkatkan jumlah sekolah yang melaksanakan PJAS secara mandiri, sangat diharapkan pemerintah daerah melakukan replikasi program PJAS ini di tahun mendatang. BBPOM Jayapura akan terus melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang mereplikasi program PJAS.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring

Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman, dan Pengawasan, Komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan pihak sekolah yang baik, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2022.

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kendala dalam pemaksimalan program PJAS adalah masih kurangnya komitmen dan tindak lanjut nyata dari instansi terkait dalam pemenuhan sarana dan prasarana kantin sekolah. Masih diperlukan advokasi secara terus menerus kepada pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengalokasikan anggaran dalam pembangunan/perbaikan kantin sekolah.

Telah dilakukan advokasi lintas sektor di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Nabire.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Kendala dalam pemaksimalan program PJAS adalah masih kurangnya komitmen dan tindak lanjut nyata dari instansi terkait dalam pemenuhan sarana dan prasarana kantin sekolah. Masih diperlukan advokasi secara terus menerus kepada pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengalokasikan anggaran dalam pembangunan/perbaikan kantin sekolah.	Telah dilakukan advokasi lintas sektor di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Nabire.		

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa berkembang adalah desa dengan IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.62 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	13	13	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 adalah 13 dari target 13 dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah desa pangan aman	2020	4	4	100
	2021	8	8	100
	2022	13	13	100

Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Target pada indikator ini ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Jumlah desa pangan aman	22	13	59,09

Realisasi kinerja indikator Jumlah desa pangan Aman tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dikarenakan target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru tercapai diakhir periode renstra tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.20, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Pontianak dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Realisasi indikator ini sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing Balai, begitupun terhadap target nasional (648) yang merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Taget jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 desa pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Jayawijaya 1 desa (Kampung Honelama); Lokus Stunting
2. Kabupaten Biak Numfor 2 desa (Kelurahan Snerbo dan Kelurahan Brabaken); Lokus Non Stunting
3. Kabupaten Nabire 2 Desa (Kelurahan Karang Tumaritis dan Kelurahan Girimulyo); Lokus Non Stunting

Sedangkan target pengawalan adalah 4 desa yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (Januari - Juni/TW I - TW II); Skor 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader (April - Juli/TW II - TW III); Skor 15%
4. Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas (Mei - September/TW II - TW III); Skor 15%
5. Fasilitasi Kemanan Pangan (Juni - September/TW II - TW III); Skor 10%
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi (Mei - September/TW II - TW III); Skor 5%
7. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
8. Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%

9. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor (Nopember - Desember/TW IV); Skor 5%
10. Lomba Desa Pangan Aman (Desember/TW IV); Skor 5%
11. Pengawasan (Juni - Desember/TW II - TW IV) ; 10%

Pada tahun 2022 telah dilakukan seluruh tahapan kegiatan (sebelas kegiatan) pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire sehingga capaian target adalah 100%. Telah dilakukan pengadaan gimmick dan rapid test, dan sebagian telah diserahkan pada Desa Pengawasan di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, dan Kab. Supiori.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya Desa yang diintervensi
- Komitmen yang tinggi dari perangkat desa dan kader yang sudah dilatih untuk mengikuti seluruh tahapan GKPD
- Komitmen yang tinggi dari petugas melaksanakan seluruh tahapan, dimana pada semua desa hanya beberapa kader yang aktif dan memiliki kompetensi yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas turun langsung bersama kader aktif melakukan tahapan fasilitasi kepada rumah tangga yang telah ditargetkan.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam keberlanjutan indikator ini antara lain:

- Pemerintah daerah belum menyatakan komitmen nyata untuk mereplikasi program ini di tahun berikutnya
- Sebagian besar desa belum memiliki inisiatif untuk menambah kader dan melaksanakan program GKPD secara mandiri

Program GKPD yang telah berjalan di tahun 2022 diharapkan dapat dijalankan secara mandiri oleh desa yang telah diintervensi, dan untuk meningkatkan jumlah desa yang melaksanakan GKPD secara mandiri, sangat diharapkan pemerintah daerah melakukan replikasi program GKPD ini di tahun mendatang. BBPOM Jayapura akan terus melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang mereplikasi program GKPD.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan produk informasi keamanan pangan dan rapid test, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk

kader, Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas, Fasilitasi Kemanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi, Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas, Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor, Lomba Desa Pangan Aman, dan Pengawasan, Komunikasi yang baik dengan perangkat desa dan kader, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Desa Pangan Aman tahun 2022.

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tahapan sesuai pedoman kegiatan, meningkatkan peran serta pemda melalui OPD terkait dengan melibatkan baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, melibatkan dalam seluruh tahapan kegiatan serta pemberian paket edukasi dan test kit sebagai inisiasi bagi desa agar dapat melanjutkan program secara mandiri.

Telah dilakukan advokasi lintas sektor di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Nabire.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	BBPOM di Jayapura akan tetap melakukan komunikasi yang baik dengan unsur-unsur terkait agar tahapan kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada perangkat desa dan kader yang telah dilatih akan dilakukan agar komitmen tetap terjaga serta penyiapan dokumen perencanaan program kegiatan keamanan pangan mandiri dapat dilakukan. Sebagian besar desa yang sudah diintervensi dengan program GKPD belum melanjutkan program-program yang ditetapkan dalam GKPD dan belum ada distrik (kecamatan) yang melakukan replikasi Desa Pangan Aman. Untuk itu diperlukan advokasi kepada pemerintah daerah agar melanjutkan/mereplikasi program GKPD.	Telah dilakukan advokasi lintas sektor di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Nabire.		

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.65 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada tahun 2022 adalah 12 dari target 12 dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.65 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2020	2	2	100
	2021	8	8	100
	2022	12	12	100

Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Target pada indikator ini ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	22	12	54,55

Realisasi kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dikarenakan target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru tercapai diakhir periode renstra tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.21, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Serang. Realisasi indikator ini sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing Balai, begitupun terhadap target nasional (255) yang merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 pasar pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 6 pasar yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian *progress*. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

- Advokasi (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
- Survei Pasar (Januari - April/TW I - TW II); Skor 5%
- Bimtek Pengelola Pasar (April - Juni/TW II); Skor 15%
- Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap I (April - Mei/TW II); Skor 20%
- Penyuluhan (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%

- f. Kampanye (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5% 7. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 20%
- g. Lomba Pasar Aman (Desember/TW IV); Skor 10%

Pada tahun 2022 telah dilakukan seluruh tahapan kegiatan (tujuh tahapan) pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Telah dilakukan juga pengawalan pasar yang diintervensi tahun 2022 sehingga capaian target adalah 100%.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya dengan OPD yang terkait (Dinas Perindagkop, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten)
- Komitmen yang tinggi dari petugas pengelola pasar dan kader yang sudah dilatih untuk mengikuti seluruh tahapan PPABK
- Komitmen yang tinggi dari pengelola pasar melaksanakan seluruh tahapan

Hal-hal yang menjadi kendala dalam keberlanjutan indikator ini antara lain:

- Pemerintah daerah belum menyatakan komitmen nyata untuk mereplikasi program PABK di pasar lain di tahun berikutnya
 - Sarana dan prasarana pasar yang belum sesuai standar, khususnya sarana prasarana untuk hygiene sanitasi antara lain belum tersedia toilet dalam jumlah yang cukup, wastafel dan minimnya air bersih
 - Masih rendahnya kompetensi petugas pasar dengan latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan pengujian pangan yang aman, sehingga BBPOM di Jayapura harus terus mendampingi pelaksanaan dan pengawalan program PABK
- Program PABK yang telah berjalan di tahun 2022 diharapkan dapat dijalankan secara mandiri oleh pasar yang telah diintervensi, dan untuk meningkatkan jumlah pasar yang melaksanakan PPABK secara mandiri, sangat diharapkan pemerintah daerah melakukan replikasi program PABK ini di tahun mendatang. BBPOM Jayapura akan terus melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang mereplikasi program PABK

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi, Survei Pasar, Bimtek Pengelola Pasar, Monev (Sampling dan Pengujian), Penyuluhan, Kampanye, Monev

(Sampling dan Pengujian) Tahap II, dan Lomba Pasar Aman, Komunikasi yang baik dengan pengelola pasar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Berbasis Komunitas tahun 2022.

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

BBPOM di Jayapura akan tetap melakukan komunikasi yang baik dengan unsur-unsur terkait agar tahapan kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada pengelola pasar yang telah dilatih akan dilakukan agar komitmen tetap terjaga dan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas terus dilaksanakan secara mandiri serta memanfaatkan paket *test kit* yang diberikan. Selanjutnya upaya pengawasan dilakukan dengan komunikasi yang intensif melalui pembentukan *Whatsapp* grup agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar pasar lain.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	BBPOM di Jayapura akan tetap melakukan komunikasi yang baik dengan unsur-unsur terkait agar tahapan kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada pengelola pasar yang telah dilatih akan dilakukan agar komitmen tetap terjaga dan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas terus dilaksanakan secara mandiri serta memanfaatkan paket <i>test kit</i> yang diberikan. Selanjutnya upaya pengawasan dilakukan dengan komunikasi yang intensif melalui pembentukan <i>Whatsapp</i> grup agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar pasar lain.	Telah dilakukan pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada pengelola pasar		

3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VI diperoleh rata-rata capaian sebesar 100,05% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.835.457.528,- Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.67 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,10	100,10	Memenuhi ekspektasi
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi ekspektasi
Rata-rata				100,05	Memenuhi EKspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dan Obat kuasi

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SOP).

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- A. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
- B. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium dikalikan dengan 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.68 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,10	100,10	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 100,10% dari target 100% dengan capaian 100,10% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	95	99,91	105,17
	2021	100	100,04	100,04
	2022	100	100,10	100,10

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 yang melebihi capaian maksimal dikarenakan sampel yang disampling melebihi target output Pagu anggaran. Sedangkan capaian kinerja

mengalami penurunan dengan tahun 2020 dikarenakan adanya reviu target tahun 2021 dan 2022 sesuai permintaan Bappenas sehingga capaian dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,10	100,10

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.22, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (100%) BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Serang sudah mencapai target nasional dan ketiga Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target sampel Obat Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 1465 sampel. Obat yang diperiksa pada tahun 2022 sebanyak 1468 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 1935 sampel. Sampel yang diuji terdiri dari sampel rutin sebanyak 1468 sampel dan sampel regionalisasi dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi V sebanyak 467 sampel.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Perencanaan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling
- Konsistensi pelaksanaan sampling setiap minggu ketiga bulan berjalan
- Koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling, dimana sebagian sampel tidak ditemukan di sarana pada saat sampling
- Koordinasi substansi pemeriksaan dengan substansi laboratorium pengujian terkait kepastian jumlah dan jenis sampel, dan ketersediaan reagen dan media pada laboratorium pengujian
- Komunikasi dan koordinasi dengan UPT lain di lingkup regional V (Makassar, Jayapura, Manokwari, Sofifi, Mamuju, Kendari, Mimika, Merauke, Sorong, Palopo, Bau Bau)
- Kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian

Di sisi lain terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- Jumlah sebagian sampel per item menjadi lebih banyak, sementara ketersediaan produk yang memenuhi kriteria untuk disampling di sarana distribusi terbatas, khususnya untuk produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Sebagian sampel yang dikirim dari UPT lain tidak dapat diprediksi jumlahnya. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan reagen dan media
- Meningkatnya frekuensi penggunaan alat tertentu, seperti GCMS dan HPLC yang menyebabkan tingginya kebutuhan suku cadang dan biaya pemeliharaan

Untuk mempertahankan capaian tersebut, akan dilakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait jumlah sampel yang akan dikirimkan setiap bulannya. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Perencanaan sampling yang matang dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman sampling 2022
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan percepatan pengujian sampel Obat, pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium. Kerusakan kondensor dan kran AAS telah dapat diatasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pengujian sampel Obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisaasi laboratorium.	Telah dilakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisaasi laboratorium		

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman

sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai *catchment area*.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji dilaboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau SOP.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah sampel Makanan yang masuk Labooratorium dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.72 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 100% dari target 100% dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	85	99,97	117,38
	2021	100	100	100
	2022	100	100	100

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan capaian kinerja mengalami penurunan dengan tahun 2020 dikarenakan adanya reviu target tahun 2021 dan 2022 sesuai permintaan Bappenas sehingga capaian tahun 2022 sesuai dengan target maksimal dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

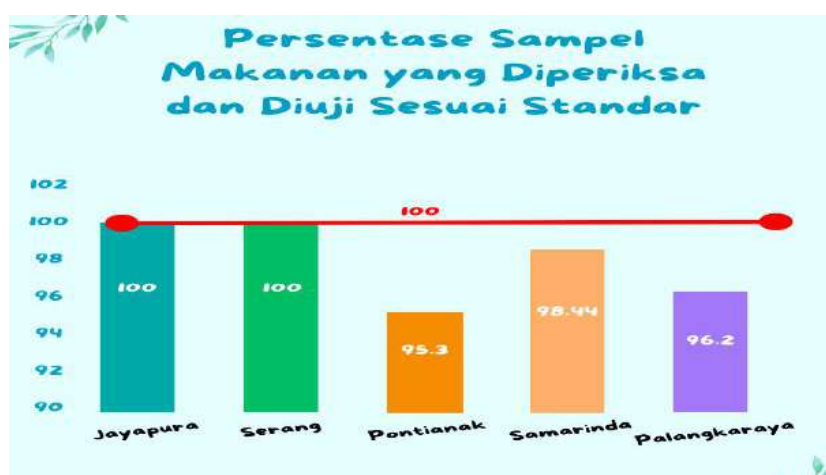
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.23, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Serang yang terendah adalah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (100%) BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Serang sudah mencapai target nasional dan ketiga Balai lainnya belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target sampel Makanan Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 705 sampel yang terdiri dari sampel pangan sebanyak 580 sampel dan fortifikasi sebanyak 125 sampel. Sampel makanan yang diperiksa pada tahun 2022 sebanyak 705 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 850 sampel yang terdiri dari sampel rutin sebanyak 705 sampel dan sampel regionalisasi sebanyak 145 sampel dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Perencanaan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling
- Konsistensi pelaksanaan sampling setiap minggu ketiga bulan berjalan
- Koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling, dimana sebagian sampel tidak ditemukan di sarana pada saat sampling
- Koordinasi substansi pemeriksaan dengan substansi laboratorium pengujian terkait kepastian jumlah dan jenis sampel, dan ketersediaan reagen dan media pada laboratorium pengujian
- Komunikasi dan koordinasi dengan UPT lain di lingkup regional V (Makassar, Jayapura, Manokwari, Sofifi, Mamuju, Kendari, Mimika, Merauke, Sorong, Palopo, Bau Bau)
- Kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian

Di sisi lain terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- Jumlah sebagian sampel per item menjadi lebih banyak, sementara ketersediaan produk yang memenuhi kriteria untuk disampling di sarana distribusi terbatas, khususnya produk *frozen food*
- Meningkatnya frekuensi penggunaan GCMS mengingat BBPOM Jayapura hanya memiliki 1(satu) unit yang digunakan untuk semua komoditi, termasuk sampel regional. Hal tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan suku cadang dan gas Helium.

- Meningkatnya risiko rusaknya sampel pada saat pengiriman

Untuk mempertahankan capaian tersebut, akan dilakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain dalam regional V terkait perubahan-perubahan pada tahun 2023. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Perencanaan sampling yang baik dan pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Sampling 2022
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan percepatan pengujian sampel Makanan, pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pengujian sampel makanan dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium	Telah dilakukan percepatan pengujian sampel makanan		

3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Capaian indikator ini adalah 197% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, maka berdasarkan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%, sehingga nilai NPS indikator ini adalah menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.612.117.690,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.75 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	197 (120)	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan perundang - undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.76 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	197	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 99% dari target 50% dengan capaian 197% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Capaian Indikator ini menggunakan nilai maksimal yaitu 120%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.77 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2020	35	32,96	94,17%
	2021	42	70,35	167,50%
	2022	50	99	197

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.78 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	99	152,31

Realisasi kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Pada tahun 2023 akan dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian target 2024 indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.24, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (73%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Serang belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura pada tahun 2022 sudah mencapai target.

- Capaian tahapan perkara tahun 2022 sebagai berikut :
 - ✓ Realisasi perkara tahun 2022 (tahun n) sebanyak 4 perkara dengan rincian 4 perkara tahap II, 3 diantaranya telah sampai pada putusan pengadilan, sedangkan 1 perkara masih dalam proses persidangan.
 - ✓ Realisasi perkara carry over pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara, pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Perkara carry over tahun 2017 dan tahun 2018 tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua tersangka melakukan pra peradilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan seluruh permohonan ditolak oleh hakim pra peradilan. Sejak tahun 2017, berbagai upaya penyelesaian perkara telah dilakukan antara lain :
- Koordinasi dan komunikasi intens dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura, Polres Keerom, Polres Jayapura, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, Pengadilan Tinggi Papua, Pengadilan Negeri Jayapura, Mabes Polri, Kedepatian IV Badan POM, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Jayapura, namun perkara tersebut belum tuntas.
- Upaya penangkapan (paksa) telah dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Polda Papua, Polres Keerom, dan Polres Jayapura, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil.
- Pendekatan persuasif kepada para tersangka dan keluarganya telah dilakukan namun para tersangka tidak kooperatif

- Sedangkan 2 (dua) perkara *carry over* tahun 2021 telah selesai hingga putusan pengadilan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh :

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dan intens dengan unsur-unsur CJS (Criminal Justice System)
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin
- Penerapan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir), dimana hasil pemeriksaan rutin yang telah ditindaklanjuti sesuai SOP, dan sudah diberikan sanksi administratif berulang kali, namun karena tidak ada perbaikan dari sarana tersebut, selanjutnya dilakukan penegakan hukum. Dalam hal ini komunikasi kelompok substansi pemeriksaan dan kelompok substansi penindakan berjalan dengan baik.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala khususnya untuk perkara yang *carry over*, dimana tersangka tidak kooperatif sekalipun telah dilakukan berbagai upaya pendekatan. Salah satu penyebabnya adalah bergabungnya tersangka tersebut dalam sebuah organisasi bentukan terdakwa yang telah berperkara sebelumnya dan perkara yang bersangkutan belum *inchrach*.

Rekomendasi untuk tahun 2023 diperlukan perangkat komputer/laptop dan perangkat komunikasi (Handphone/ponsel) yang memadai untuk meningkatkan kualitas informasi intelijen, sehingga bernilai maksimal (A1) dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan sumber/pelaku utama pelanggaran Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Serta mendukung kegiatan dibidang penindakan yang dilakukan secara online seperti digital forensik/ analisis digital, patroli siber, yang menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi data crawler, data miner dan lain sebagainya.

Capaian indikator yang telah melampaui target dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi penyesuaian target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan telah mendapat persetujuan kenaikan target di tahun 2023, dari 57% menjadi 73%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pencapaian target tahun 2023, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan CJS (*Criminal Justice System*) harus ditingkatkan. Demikian juga kegiatan intelijen dan patrol cyber perlu ditingkatkan intensitasnya, agar informasi

dan trend pelanggaran yang terjadi dilingkup pengawasan dapat diketahui dan dipetakan dengan baik dan *up to date*, sehingga keberhasilan operasi penindakan dapat meningkat.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) Telah terjalin sinergitas yang baik dengan instansi terkait baik dengan pemerintah daerah maupun unsur-unsur CJS. Contohnya dalam pelaksanaan operasi intelijen dan penindakan telah melibatkan pemerintah daerah dan Korwas Polda Papua. Sementara dalam penyelesaian perkara, intens dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi bersama dengan Korwas Polda Papua.
- 2) Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara matang, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Kerjasama yang baik dengan jasa pengiriman dalam penanganan perkara obat-obatan illegal yang dikirimkan dari luar Papua.
- 4) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM.
- 5) Peningkatan jejaring informasi dengan mengintensifkan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan obat dan makanan

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

1. Telah dilakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain Direktorat Kriminal Khusus POLDA Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura, POLRES di lingkup POLDA Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Organisasi Profesi dan Asosiasi Jasa Pengiriman.
2. Untuk mendukung keberhasilan intelijen telah difasilitasi dengan kendaraan operasional untuk petugas intelijen melaksanakan tugasnya mengumpulkan bahan keterangan/informasi secara tertutup (kegiatan penyamaran)
3. Untuk perkara-perkara *carry over* yang akan diselesaikan pada tahun selanjutnya agar dianggarkan biaya penyelesaian perkara-perkara tersebut

sehingga tidak menggunakan anggaran untuk kegiatan penindakan pada tahun berjalan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2 (dua). Memfasilitasi tersangka yang akan tahap 2 (dua) untuk uji bebas Covid-19. Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Papua melalui Korwas Polda Papua / tahap 1 (satu) 	Telah dilakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang berkaitan dengan perkara		

3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VIII diperoleh rata-rata capaian sebesar 99,47% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.405.716.775,- Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.79 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,80	90,05	103,74	Memenuhi Ekspektasi
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2	78,25	95,19	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			99,47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,80	90,05	103,74	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 adalah 90,05 dari target 86,80 dengan capaian 103,74% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.81 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	2020	85	68,65	80,76
	2021	84,8	84,76	99,95
	2022	86,80	90,05	103,74

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Hal ini disebabkan oleh komitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN BBPOM Jayapura dalam membangun Zona Integritas di unit kerja dan penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi dari Pimpinan Unit Kerja sampai ke level yang paling bawah.

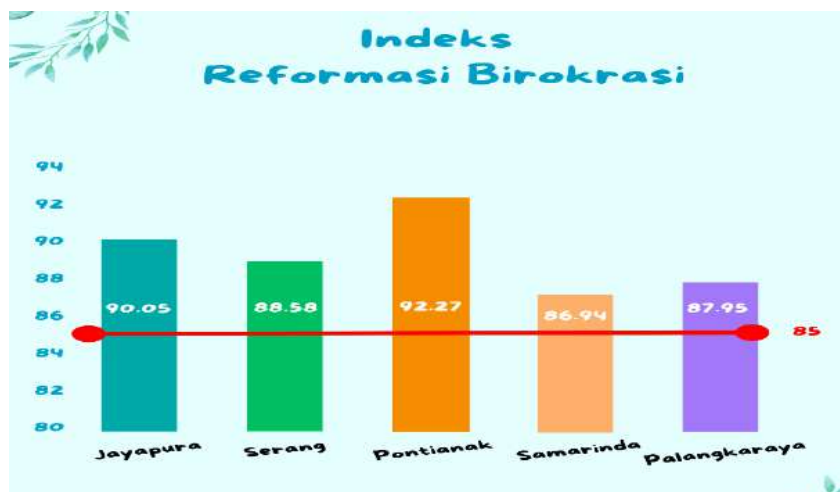
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.82 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	90,8	90,05	99,17

Realisasi kinerja indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Kinerja BBPOM di Jayapura akan terus ditingkatkan hingga mencapai target akhir di Tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.25, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Pontianak dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (85), Kelima Balai sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam mendukung capaian indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura berkomitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN untuk membangun Zona Integritas di unit kerja dan telah menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi serta Budaya Organisasi. Seluruh aspek penilaian pembanguann Zona Integritas mengalami kenaikan dibanding dari tahun 2021.

	<u>Penilaian</u>	<u>Bobot</u>	<u>Aspek Pemuhan</u>	<u>Aspek Reform</u>	<u>Total Nilai</u>	<u>Keterangan</u>
A	PENGUNGKIT	60,00				
	<u>I. Manajemen Perubahan</u>	8,00	3,66	3,67	7,33	MS
	<u>II. Penataan Tata Laksana</u>	7,00	2,56	2,59	5,15	MS
	<u>III. Penataan Sistem Manajemen SDM</u>	10,00	4,56	5,00	9,56	MS
	<u>IV. Penguatan Akuntabilitas</u>	10,00	4,84	4,14	8,98	MS
	<u>V. Penguatan Pengawasan</u>	15,00	6,34	7,5	13,84	MS
	<u>VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</u>	10,00	4,11	3,76	7,87	MS
	TOTAL PENGUNGKIT				52,72	
B	HASIL	40,00				
I	<u>Birokrasi Bersih dan Akuntabel</u>	22,50			21,36	
	<u>1. Nilai Survey Persepsi Korupsi</u>	17,50			16,36	MS
	<u>2. Capaian Kinerja Lebih Baik</u>	5,00			5,00	MS
II	<u>Pelayanan Publik yang Prima</u>	17,50			15,97	
	<u>Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)</u>	17,50			15,97	MS
	TOTAL HASIL				37,33	
	NILAIP MPZI				90,05	

Capaian ini didukung oleh peran setiap pokja Area Perubahan dan peran *Agent of Change* yang mengawal setiap rencana aksi berjalan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Jayapura.

Dengan nilai Indeks RB BBPOM Jayapura yang telah memenuhi ekspektasi yaitu sebesar 90,05 tetapi belum diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk memperoleh predikat WBK.

Demikian juga Penilaian Capaian Kinerja yang dihitung dari SAKIP Tahun 2021 terhadap SAKIP Tahun 2020 mengalami kenaikan (Lebih Baik) dengan bobot 5 (syarat 2,5) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK adalah :

- Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI terlaksana sesuai rencana kerja dan belum terdapat justifikasi atas kegiatan yang belum terlaksana.
- SOP telah mengacu pada peta proses bisnis namun belum terdapat inovasi.
- Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang kinerja.
- Terdapat rencana aksi hasil monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System (WBS) yang belum ditindaklanjuti dan ditetapkan timeline penyelesaiannya.
- Terdapat potensi benturan kepentingan yang belum teridentifikasi dengan baik.
- Standar Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura belum sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Terhadap hal-hal tersebut akan dilakukan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan seluruh aspek Reformasi Birokrasi agar Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dapat dipertahankan dan ditingkatkan,yaitu :

- 1) Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menyusun justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja.
- 2) Menyusun inovasi SOP yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan unit kerja maupun pelanggan unit kerja.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
- 4) Menyusun tindak lanjut rencana aksi atas hasil monitoring dan evaluasi WBS dengan disertai *timeline* tindak lanjut.
- 5) Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh pegawai.
- 6) Mereviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 7) Melakukan reviu Standar Pelayanan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan Pengaduan Masyarakat serta melibatkan *stakeholders*.

- 8) Pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan disertai kertas kerja dan memenuhi unsur penilaian berupa disiplin maupun kinerja.
- 9) Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan *stakeholder*, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
- 10) Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indeks RB ini karena komitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN untuk membangun Zona Integritas di unit kerja dan penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi serta Budaya Organisasi dari Pimpinan Unit Kerja sampai ke level yang paling bawah.

Pada tahun 2022 telah dilakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Intern oleh Inspektur I BPOM di Balai besar POM di Jayapura pada tanggal 7 November 2022 , disampaikan :

- Tindak Lanjut Rekomendasi Audit APIP dan BPK,
- Hasil SKM, IPP, dan IPK
- Reviu LK, RKAKL, dan Monev Implementasi P3DN
- Audit Internal
- Akuntabilitas Kinerja
- Area Penguatan Pengawasan
- Capacity Building /Learning Organization untuk seluruh ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tanggal 8-9 Desember 2022, dengan tema ***Excellent Communication for Trusted Governmet*** dan menghadirkan Narasumber dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua dan KPPN Jayapura serta Motivator
- Pelaksanaan implementasi Program kerja setiap Pokja Area Perubahan dilaksanakan dan di monev setiap triwulan
- Pelaksanaan Implementasi Inovasi dari *Agent of Change*

Pelaksanaan implementasi RB tahun 2022 di BBPOM Jayapura :

1. Telah mempermudah pelanggan antara lain dengan:

- Aplikasi berbasis web yaitu Noken (Nengok Sampel Online) untuk memantau sampel yang diujikan dengan memasukkan kode billing, melakukan pengecekan tarif dan parameter uji pada menu tarif.
- Pendampingan secara langsung dan jemput bola kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun lembaga lain yang membutuhkan pendampingan meliputi layanan desk CAPA, registrasi produk untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dan sertifikasi CPOTB, CPKB serta CPPOB.
- Pelayanan pengujian cepat untuk sampel barang bukti narkoba hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak sampel diserahkan ke laboratorium

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

BBPOM di Jayapura telah membangun Zona Integritas dengan menerapkan seluruh aspek Reformasi Birokrasi meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan pengawasan, dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Seluruh pegawai telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Telah dibuat inovasi antara lain:

- Cendrawasih Beken (Catatan Daftar Risiko untuk pengaWasan Internal dan Benturan KEpentingan)
- Laporan pace
- Sarang semut (sarana pelayanan publik secara mudah dan cepat tanggap)
- Noken (nengok sampel online)
- K@PK (keluarga pantang korupsi)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut: menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal, menyusun tindak	Telah dibuat beberapa inovasi		

<p>lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, menyusun tindak lanjut pemenuhan kesenjangan kompetensi, melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja. Belum terdapat inovasi dalam penerapan SPIP, <i>whistle blowing system</i>, inovasi dalam penerapan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p>			
--	--	--	--

2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:
 - Dokumen perencanaan kinerja (4,80%)
 - Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) (7,20%)
 - Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)
- b) Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:
 - Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,80%)
 - Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%)
 - Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%)

- c) Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:
 - Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,40%)
 - Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,60%)
 - Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,00%)
- d) Evaluasi Internal (20%) meliputi aspek:
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4,00%)
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6,00%)
 - Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10,00%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - Kinerja yang dilaporkan (*output*) (7,5%)
 - Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (12,5%)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.83 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2	78,25	95,19	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 adalah 78,25 dari target 82,2 dengan capaian 95,19% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 merupakan penilaian AKIP dari tahun 2021.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	80,0	77,22	96,53

Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	2021	79,7	78,96	99,07
	2022	82,2	78,25	95,19

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 namun penurunan pada tahun 2021, sedangkan capaian indikator pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

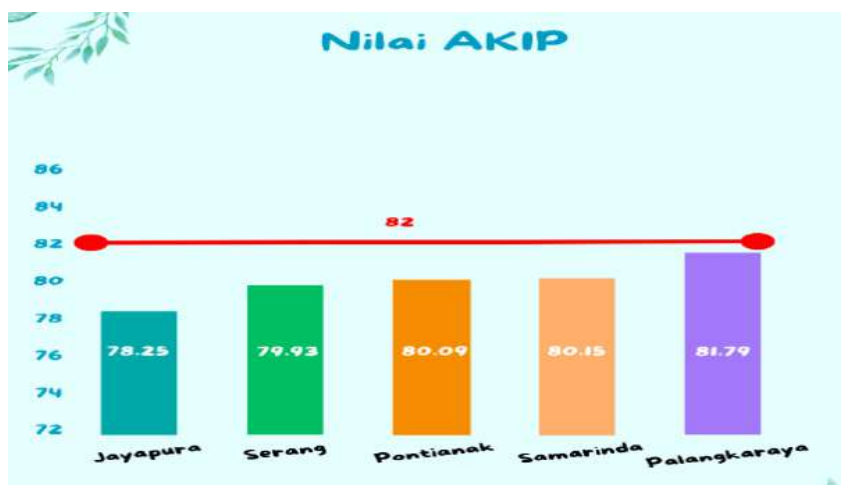
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.85 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 dengan Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	87,2	78,25	89,74

Realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra Tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Upaya dalam meningkatkan nilai AKIP yaitu menindaklanjuti rekomendasi dari APIP.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.26, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (82) Kelima Balai belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Jayapura pada tahun 2022 belum mencapai target.

Nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam hal ini Inspektorat I sebagai evaluator terdiri dari 5 (lima) komponen penilaian yaitu :

- Perencanaan Kinerja (24%)
- Pengukuran Kinerja (24%)
- Pelaporan Kinerja (12%)
- Evaluasi Internal (20%)
- Capaian Kinerja (20%)

Dengan Hasil penilaian terhadap SAKIP BBPOM di Jayapura yaitu Perencanaan Kinerja dengan nilai 19,68 yang didukung oleh dokumen antara lain Rencana strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Pengukuran Kinerja dengan nilai 18,48 yang didukung oleh dokumen antara lain Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan SOP pengumpulan Data, Laporan Kinerja, dan Laporan Evaluasi Internal, Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,24 yang didukung oleh dokumen antara lain Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Interim, Laporan Evaluasi, dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 14,60 yang didukung oleh dokumen antara lain Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, dan SK Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Capaian Output dengan nilai 16,25 yang didukung oleh Kertas Kerja Evaluasi dari Output dan Outcome.



Gambar 3.27 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2021 dan 2022 terdapat perbedaan pembobotan masing-masing komponen. Pembobotan yang sama terdapat pada komponen Capaian Kinerja yaitu mengalami kenaikan dari tahun 2021. Namun, secara keseluruhan Nilai Akip Balai Besar POM di Jayapura mengalami penurunan sebesar 0,712.

Belum tercapainya target nilai AKIP antara lain disebabkan oleh :

1. Belum konsistennya data yang diinput pada periode yang ditetapkan yang mempengaruhi pengukuran kinerja.
2. Belum konsistennya pembahasan capaian kinerja dan anggaran dalam laporan evaluasi internal yang dilakukan secara periodik sehingga dapat diperoleh rekomendasi atau tindak lanjut atas indikator yang belum tercapai untuk dilakukan perbaikan pada periode selanjutnya.
3. SOP Pengumpulan data belum menyajikan jika terjadi kesalahan data dan mekanisme apabila terjadi kesalahan data.
4. Kertas Kerja penetapan target perlu dilengkapi dengan basis data yang akurat.

Dalam pencapaian indikator ini upaya yang dilakukan antara lain :

- Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BBPOM di Jayapura dengan menyusun dokumen perencanaan antara lain Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, selain itu membuat Laporan Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan.
- Rapat pembahasan terkait evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.
- Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja dalam berbagai bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan.

- Menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektorat I sebagai mitra pengawasan BBPOM di Jayapura .
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap target dan realisasi untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama.
- Melakukan monev dan pelaporan secara berkala baik online antara lain monev DJA, Bappenas, *e-performance* maupun manual antara lain monev RAPK dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2022 oleh Inspektorat I Badan POM, akan sepenuhnya ditindaklanjuti secara konsisten antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target, pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja
- b. Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Meminimalisir adanya kesalahan data dengan revidi berjenjang dan memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.
- b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja dari tingkat unit sampai pada tingkat individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* yang tertuang dalam kebijakan internal jika belum diatur di level Badan POM.
- c. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, menetapkan penanggung jawab data dan melengkapi mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dengan target nasional dan perbandingan lain yang diperlukan dalam Lapkin
 - b. Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam Lapkin
 - c. Memaksimalkan pemanfaatan informasi capaian kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja untuk menyusun rencana tindak lanjut perbaikan pada periode berikutnya dan menindaklanjuti rencana aksi periode sebelumnya dengan membuat matriks monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja dari Lapkin
4. Evaluasi Internal
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan permasalahan /kendala /hamabatan/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/rencana aksi.
 - b. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP unit kerja.
5. Capain Kinerja
- a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kienrja secara berkala.
 - b. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya
 - c. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.

F. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.

G Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja	a. Pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait target indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan sudah ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada Desember 2022		

3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IX adalah 101,18% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.460.434.342,-.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.86 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,40	85,40	101,18	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi : Kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Pengukuran pada pendidikan formal terakhir yang telah diakui atau disahkan oleh BKN . Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25%
- b) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti dan mempunyai kesesuaian dengan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40%. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- c) Kinerja : Kontribusi sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran indikator yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- d) Disiplin : mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Kontribusi sebesar 5% dari indikator yang digunakan.

Nilai indeks profesionalitas BBPOM di Jayapura tahun 2022 adalah 85,4 dari data 67 PNS BBPOM di Jayapura.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.87 Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,40	85,40	101,18	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada Tahun 2022 adalah 85,40 dari target 84,40 dengan capaian 101,18% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	2020	75	83,44	111,25
	2021	84	84,93	101,11
	2022	84,40	85,40	101,18

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sedangkan capaian indikator pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tetapi mengalami kenaikan dengan tahun 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	85	85,40	100,47

Realisasi kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.27, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Serang. Sedangkan terhadap target nasional (84) Kelima Balai sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gabungan dari beberapa komponen penilaian yaitu: kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai meliputi diklat kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Upaya yang telah dilakukan Balai besar POM di Jayapura, untuk peningkatan kompetensi antara lain Diklat Latsar bagi CPNS BPOM TA 2022, pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional, pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai melalui pelatihan teknis baik secara *online* maupun tatap muka serta dilakukan monitoring setiap bulan untuk melihat pencapaian JP bagi setiap pegawai dalam pemenuhan target 20 JP pengembangan kompetensi dalam satu tahun. Penghargaan Pegawai Teladan bulanan '*Employee of The Month*' dan reward dan *punishment* KOTEKA (Ko Terlambat Kaka) sebagai implementasi monitoring kedisiplinan pegawai.

Implementasi kinerja, telah dilakukan penilaian kinerja dan *desk* monitoring dan evaluasi penilaian kinerja tahun 2022, serta penilaian perilaku 360 untuk seluruh pegawai dengan hasil penilaian kinerja kategori Baik.

Namun demikian, masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang diampunya, untuk itu akan diusulkan pelaksanaan diklat kepemimpinan dan diklat fungsional bagi pegawai yang belum memenuhi kompetensi diklat.

Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami unsur-unsur penilaian SKP, untuk itu akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pegawai. Terkait kompetensi akan dilakukan pelatihan fungsional bagi Pejabat Fungsional yang belum memiliki kompetensi pelatihan fungsional, demikian juga untuk Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk Pejabat Struktural Eselon II.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura, di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Terlaksananya pengembangan kompetensi baik pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan *workshop*/seminar yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM dan Balai Besar POM di Jayapura.
2. Keikutsertaan dalam program tugas belajar di dalam negeri maupun di luar negeri oleh beberapa pegawai.
3. Konsistensi pelaksanaan program inovasi Koteka
4. Monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan 20 Jam Pelajaran secara rutin
5. Komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM

G. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pencapaian indikator ini meliputi monitoring dan evaluasi pemenuhan 20 JP pengembangan kompetensi teknis dan *workshop*/seminar setiap pegawai, Cascading indikator kinerja utama kepala UPT ke indikator kinerja individu dalam bentuk

penyusunan matiks peran hasil yang dituangkan dalam SKP tahun 2022, penilaian dan monev SKP per triwulan melalui aplikasi SIMAKIN.

Sosialisasi dan internalisasi penilaian kinerja pegawai untuk mendorong pemahaman pegawai akan target dan indikator SKP sebagai dasar penilaian kinerja individu.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring secara intens terhadap peningkatan kompetensi 20 JP dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti program tugas belajar atau ijin belajar serta penugasan kepada jabatan struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan. Internalisasi peraturan kepegawaian dan kode etik terbaru, pelaksanaan <i>Coaching, Mentoring</i> dan <i>Consulting</i> oleh atasan langsung akan dilakukan secara intensif	Belum selesai 100%	Akan dilaksanakan diklat kepemimpinan untuk JPT Eselon II.	Maret-Desember 2023

3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan X diperoleh rata-rata capaian sebesar 112,08% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

1.406.243.786,- Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.90 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80.20	104,16	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	2,9	128,88 (120)	Tidak dapat disimpulkan
	Rata-rata			112,08	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.91 Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77,0	80,2	104,16	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 adalah 80,2 dari target 77,0 sehingga diperoleh persentase capaian 104,16% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2020	79	66,8	84,56
	2021	72	74,10	102,92
	2022	77,0	80,2	104,16

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Kenaikan realisasi kinerja disebabkan oleh adanya penambahan ruang lingkup, peningkatan kompetensi personil laboratorium, dan penambahan instrumen/alat laboratorium pada tahun 2022.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.93 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87	80,2	92,18

Realisasi kinerja indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan realisasi indikator ini sehingga target akhir tahun Renstra dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan Balai setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.29 realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Serang dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Terhadap target nasional (81) BBPOM di Serang, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian GLP meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi dan standar peralatan. Hasil penilaian GLP tahun 2022 sebesar 80,2% diperoleh dari persentase pemenuhan ruang lingkup 78,5%, persentase pemenuhan kompetensi 80,79%, dan persentase pemenuhan peralatan 74,2%.

Pada tahun 2022, penambahan pemenuhan ruang lingkup, antara lain Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik Perawatan Kulit Payudara, Identifikasi Solvent Red 1 pada Hair Creambath, serta Deteksi DNA Spesifik Spesies Porcine pada Sediaan Suplemen Kesehatan.

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi baik secara mandiri maupun terjadwal memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan persentase kompetensi. Dengan telah dilaksanakannya regionalisasi laboratorium, petugas penguji BBPOM Jayapura telah mendapatkan pelatihan yang relevan yang dilakukan oleh balai dalam region V (region Makassar), baik secara daring maupun secara langsung.

Demikian juga, penambahan peralatan lemari asam, makropipet dan mikropipet telah meningkatkan persentase pemenuhan peralatan.

Namun dari kegiatan-kegiatan di atas terdapat beberapa hal yang belum memberikan hasil optimal dalam pencapaian target nilai GLP antara lain terbatasnya anggaran pengadaan reagen yang digunakan untuk pemenuhan ruang lingkup, terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan sesuai dengan ruang lingkup peralatan.

BBPOM Jayapura akan berupaya meningkatkan capaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengadakan pelatihan internal untuk kompetensi yang belum terpenuhi oleh sebagian besar personil pengujian.
2. Mengikuti sertakan CPNS dalam pelatihan dasar laboratorium sesuai standar kompetensi GLP.
3. Melakukan pengadaan sampel, reagen dan media untuk menambah ruang lingkup pengujian.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan - kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan, Mikrobiologi, Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik
2. Pelatihan daring yang diadakan oleh BPOM Manokwari dan BPOM Mamuju
3. Pengadaan peralatan penunjang laboratorium (lemari asam, makropipet dan mikropipet)
4. Pengadaan reagen untuk menambah ruang lingkup pengujian

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Pada tahun 2022 telah dilakukan secara terencana pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pengadaan peralatan, dan penambahan ruang lingkup. Demikian juga monitoring dan evaluasi capaian indikator ini rutin dilakukan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	BBPOM Jayapura terus berupaya dalam peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian. Keseluruhan komponen standar GLP akan menyesuaikan dengan regionalisasi laboratorium.	telah dilakukan secara terencana pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pengadaan peralatan, dan penambahan ruang lingkup		

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud

dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai: *email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai*
 - Pusat: *email dan dashboard BOC*
- c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.94 Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	2,9	128,88	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2022 adalah 2,9 dari target 2,25 dengan capaian 128,88% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Capaian Indikator ini menggunakan nilai maksimal yaitu 120%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.95 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2020	1,51	1,575	104,30
	2021	2	2,025	101,25
	2022	2,25	2,9	128,88

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**

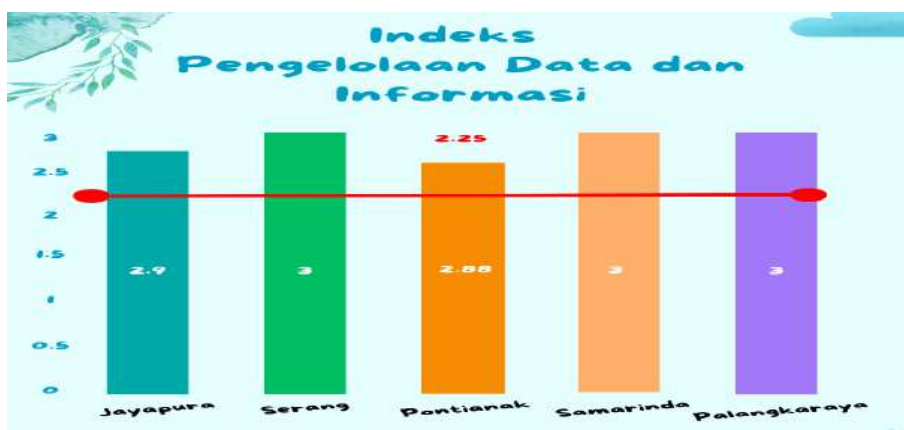
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	3	2,9	96,67

Realisasi kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan Balai yang setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.29, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Serang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Pontianak. Sedangkan terhadap target nasional (2,25) Kelima Balai sudah mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator ini didukung pemanfaatan *email corporate* yang intens oleh semua pegawai, *sharing folder*, dashboard BOC, SIPT dan SPIMKER oleh substansi terkait dan upload berita aktual secara rutin pada subsite BBPOM di Jayapura. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian indikator ini yaitu *reminder* penggunaan *email corporate* kepada semua pegawai, pengadaan alat pengolah data, pemeliharaan sarana dan prasarana IT. Demikian juga konsistensi dalam mengupload berita-berita aktual kegiatan BBPOM di Jayapura berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Namun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan masing-masing komponen indikator ini antara lain:

- Jaringan internet yang sering mengalami gangguan
- Masih kurangnya pelatihan dalam pembuatan berita aktual
- Masih terbatasnya anggaran untuk pengadaan APD dan pemeliharaan jaringan untuk memperlancar kinerja pengolahan data dan informasi

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain:

- Sosialisasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk sosialisasi indikator Pengelolaan Data dan Informasi
- Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara rutin
- Pelatihan tim IT khususnya untuk jaringan

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin penggunaan *email corporate*, *sharing folder*, dashboard BOC, SIPT dan SPIMKER secara berkala. Upload berita aktual BBPOM di Jayapura juga dilakukan secara intens sebagai media komunikasi,

informasi dan edukasi bagi masyarakat selain itu telah dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan semua pegawai/substansi/kelompok menggunakan seluruh fasilitas pengelolaan data dan informasi yang tersedia. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kompetensi pegawai akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi		

3.1.11 Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan XI diperoleh rata-rata capaian sebesar 96,66% dengan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 15.522.631.468,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.97 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,90	89,80	96,66	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Pengelolaan UPRekon LPJ Bendahara
- d) Data Kontrak
- e) Penyelesaian Tagihan
- f) Penyerapan Anggaran
- g) Retur SP2D
- h) Perencanaan Kas (Renkas)
- i) Pengembalian/Kesalahan SPM
- j) Dispensasi Penyampaian SPM
- k) Pagu Minus
- l) Konfirmasi Capaian *Output*

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.98 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,90	89,80	96,66	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada adalah 89,80% dari target 92,90% dengan capaian 96,66% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Tabel 3.99 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 dengan periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	2020	93	88,326	94,97
	2021	92,3	89,83	97,33
	2022	92,90	89,80	96,66

Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan dengan tahun 2021. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan penurunan dengan tahun 2021, dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

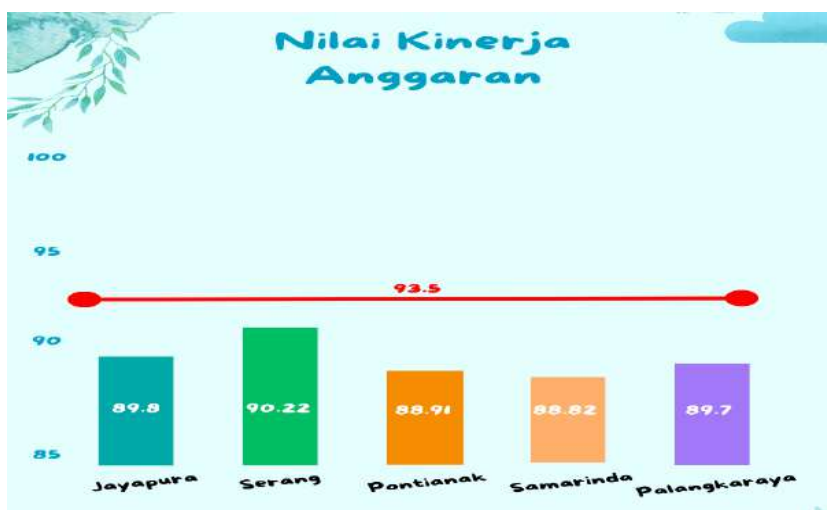
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95,3	89,80	94,23

Realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Gambar 3.31 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura dengan Balai Sejenis / Setara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 3.30, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Serang, dan yang terendah adalah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (93,5) Kelima Balai belum mencapai target nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA yang terdapat dalam aplikasi SmartDJA kemenkeu dan nilai IKPA yang terdapat dalam aplikasi OM SPAN. Nilai EKA sampai dengan bulan Desember sebesar 86,64 (data diperoleh dari Aplikasi SMART DJA) dengan kriteria baik, sedangkan nilai IKPA sebesar 94,52. IKPA ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA BBPOM di Jayapura tahun 2022 mengalami penurunan daripada capaian di tahun 2021 (94,74)

Berdasarkan capaian di 2022, indikator yang harus mendapat perhatian khusus adalah

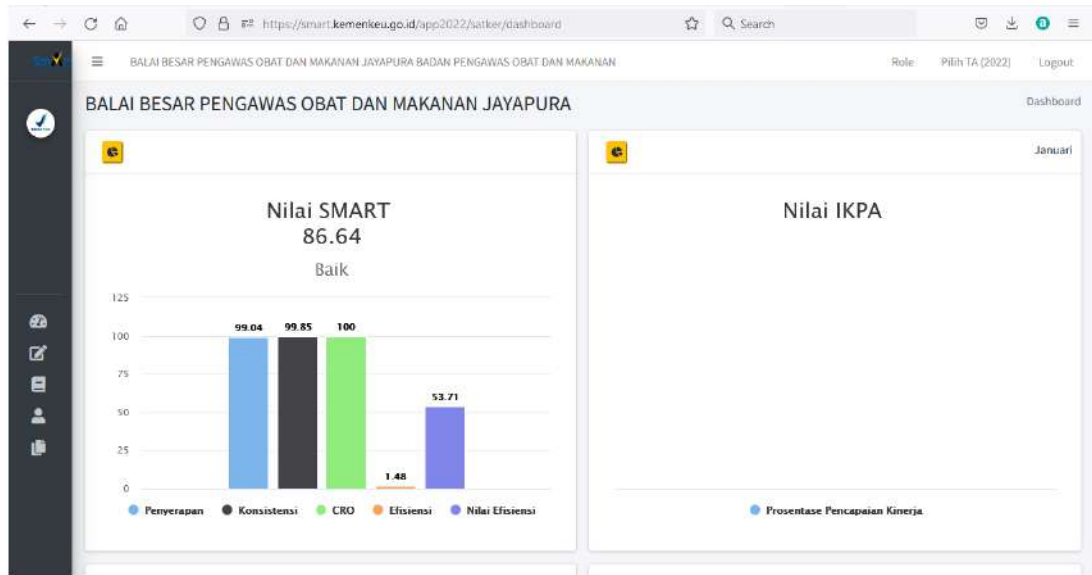
- (1) Deviasi Halaman III DIPA; karena tidak sesuai antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana per triwulan yang dimasukkan perbulan antara lain disebabkan kegiatan terpadu yang sdh direncanakan tidak terlaksana sesuai jadwal, Automatic Adjustment dimasukkan di TW III ternyata belum ada kejelasan dan masih dimasukkan dalam perencanaan, di TW IV baru dilakukan penarikan blokir anggaran.
- (2) Belanja Kontraktual proses pengadaan (pendaftaran kontrak) baru dilakukan di triwulan III (reagen dan alat), dimana seharusnya proses sudah dilakukan di TW I walaupun proses pengadaan secara keseluruhan sesuai prosedur akselerasi harus di TW I .
- (3) Penyerapan Anggaran; sisa anggaran pengadaan alat laboratorium tidak bisa dioptimalisasi dan belanja pegawai berupa uang makan tidak terserap maksimal.
- (4) Pengelolaan UP dan TUP, disebabkan tidak tepat waktu dalam revolving GUP PNBPN, perhitungan kebutuhan dengan realisasi penggunaan dana UP belum maksimal.

Untuk pencapaian target tahun 2023 :

1. Pengelolaan UP dan TUP dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan memaksimalkan penggunaan UP dan TUP.

2. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan Pendaftaran kontrak di KPPN sebelum triwulan III.

Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



CODE OPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
063	063	4329B5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	76.56	91.89	97.00	100.00	87.89	100.00	100.00	94.52	100%	94.52	
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
				Nilai Akhir	10.00	7.66	18.38	9.70	10.00	8.79	5.00	25.00				
				Nilai Aspek		88.28			95.36			100.00				

Imer:
Perdirjen Perbendaharaan PER.5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Imer:
Perdirjen Perbendaharaan PER.5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 3.32 Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian output.

- 2) Revisi Halaman III DIPA tepat waktu
- 3) Pengisian capaian output pada aplikasi Sakti sebelum batas waktu yang ditentukan

G. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya antara lain :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat mencapai target.
2. Percepatan proses pengadaan dengan menggunakan e-catalog
3. Mengupdate halaman III DIPA dengan menyesuaikan realisasi bulan sebelumnya dan melakukan perencanaan anggaran berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga perencanaan dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target Rencana Penarikan Dana
4. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan secara intens
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intens dengan KPPN Jayapura dan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi semua kegiatan secara intens setiap bulan oleh semua penanggung jawab kegiatan, percepatan penyerapan Anggaran dan memastikan semua kegiatan terlaksana sesuai target dan rencana.	Telah melakukan monitoring dan evaluasi		

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian terhadap nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura yang dilakukan oleh Inspektorat I sebagai mitra pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Dalam Penilaian terdapat beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan tetapi belum tepat pada rekomendasi yang dimaksud sehingga masih pada proses perbaikan. Adapun matriks Tindak Lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	Untuk peningkatan nilai AKIP akan dilakukan upaya sebagai berikut:			
1	Perencanaan Kinerja			
	Mencantumkan ukuran keberhasilan/indikator dan target keberhasilan untuk masing-masing tujuan, menyempurnakan penyusunan seluruh target kinerja dengan didukung basis data yang memadai, serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target secara berkala dan didokumentasikan secara tertib.	a. Telah dibuat kertas kerja untuk penyusunan target kinerja 2020-2024 per indikator berdasarkan evaluasi tahun sebelum Renstra 2020-2024	Akan dilengkapi lagi kertas kerja yang dibuat	TW I tahun 2023
		b. Telah melakukan monev pencapaian target secara berkala dan didokumentasikan secara tertib	Akan dilakukan penjelasan terkait upaya pencapaian atas kinerja dalam Laporan Evaluasi Internal (LEI) dan secara berkesinambungan saran/rekomendasi dan tindak lanjut	TW I tahun 2023
2	Pengukuran Kinerja			
	a. Menjabarkan cascading indikator unit kerja sampai dengan level individu termasuk cara perhitungan kinerja dalam membentuk nilai pada level di atasnya dan dilakukan pemantauan secara berkala serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian sebagai dasar pemberian reward dan punishment;	Telah diturunkan dalam bentuk MPH di aplikasi Simakin . pemberian reward dan punishment ke level individu sdh dilakukan dalam pemberian tunjangan kinerja	Akan dibuatkan SK Reward dan punishment level individu	TW I tahun 2023
	b. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja terkait dengan melengkapi prosedur penanganan apabila terjadi kesalahan data serta pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja.	Telah dibuat SOP pengumpulan data kinerja beserta PIC nya	Akan ditambahkan mekanisme jika terjadi kesalahan data kinerja yang disampaikan	TW I tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance dalam pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi;	Sudah dilakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait target kinerja penindaka		
3	Pelaporan Kinerja			
	Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja;		Akan memunculkan dan menindaklanjuti setiap tindak lanjut atas saran pada laporan kinerja dan laporan evaluasi internal	TW I tahun 2023
4	Evaluasi Internal			
	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	Telah melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target	Akan lebih dibahas secara mendalam laporan Evaluasi Internal	TW I tahun 2023
	b. Mengoptimalkan untuk dapat menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disusun pada periode berikutnya sebagai bentuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang;	jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan		
	c. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan;	program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi		
5	Capaian Kinerja			
	a. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja sesuai perencanaan sehingga meminimalisir penurunan capaian kinerja selanjutnya;	Sudah dilakukan monev capaian kinerja		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	b. Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk perbaikan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai salah satu bahan dalam melakukan reuiu renstra dan target kinerja;	Sudah dilakukan Pemanfaatan pemantauan dan evaluasi untuk Perbaikan capaian kinerja		
	c. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.	Sudah dilakukan Pengembangan aplikasi dalam data capaian Kinerja		

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 32.443.548.000 Terjadi beberapa perubahan terkait anggaran PAGU yang menyangkut capaian sasaran strategis. Adapun perubahan PAGU anggaran terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.101 Perubahan PAGU Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	755,057,000	682,084,000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	202,649,000	190,249,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura.	1,484,156,000	891,390,000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	2,405,585,000	1,723,367,000

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	3,111,196,000	1,759,981,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	748,728,000	745,812,000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1,377,053,000	963,252,000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	101,910,000	30,502,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	928,730,000	392,136,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	12,982,834,000	10,567,123,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	14,106,339,000	14,497,652,000
TOTAL		38,204,237,000	32,443,548,000

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran dari setiap sasaran kegiatan.

Tabel 3.102 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	837,368,000	821,256,546	98,08
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	36,388,000	36,209,110	99,51
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	192,443,000	191,763,750	99,65

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2,474,560,000	2,462,589,686	99,52
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2,552,194,000	2,536,934,029	99,40
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	836,363,000	835,457,528	99,89
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	635,752,000	612,117,690	96,28
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	406,247,000	405,716,775	99,87
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	476,764,000	460,434,342	96,57
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1,451,566,000	1,406,243,786	96,88
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	15,633,656,000	15,522,631,468	99,29
TOTAL		25,533,301,000	25,291,354,710	99,05

Realisasi anggaran BBPOM di Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar 99,05%.

3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input*

yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura tahun 2022 secara umum seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.103 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Periode Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nilai TE Rata-rata	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0,06	Efisien

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	-0,03	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0,04	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0,01	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1,06	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	-0,01	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	0,05	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	0,18	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	-0,02	Tidak Efisien

Dari perhitungan tingkat efisien kegiatan apabila dikaitkan dengan tingkat efisien setiap sasaran kegiatan dapat terlihat bahwa lebih banyak sasaran kegiatan yang memiliki capaian Efisien sebanyak 7 sasaran kegiatan dengan nilai tingkat efisien bervariasi dari 0 sampai dengan 0,18. Sedangkan sebanyak 4 sasaran kegiatan yang tidak efisien yaitu antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura terjadi karena penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan output yang dicapai dimana telah dilakukan

berbagai kegiatan pemberian informasi untuk mencapai sasaran kegiatan ini namun belum maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura terjadi karena output yang dicapai terlalu besar daripada penyerapan anggaran dimana terdapat perkara (perkara tahun berjalan dan *carry over*) yang lokus nya berada di Kabupaten yang dapat dijangkau dengan perjalanan darat yang kebutuhan anggarannya tidak besar tetapi kegiatan dapat diselesaikan.
3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal terjadi karena penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan ouput yang dicapai dimana perencanaan dan evaluasi belum berjalan secara maksimal.
4. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel terjadi karena penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan ouput yang dicapai dimana kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya, selain itu *Automatic Adjustment* masih dimasukkan di TW III ternyata belum ada kejelasan dan masih dimasukkan dalam perencanaan, di TW IV baru dilakukan penarikan blokir anggaran.

BAB IV PENUTUP

MTMMH

MEMBANGUN DE JAYAPURA

MELAYUKAN

REFORMASI



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022.

Pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil capaian sasaran strategis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah mencapai target dengan 6 (**enam**) Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, antara lain Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal, Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dengan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** antara lain Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal, Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura tahun 2022 adalah **99,05%** yaitu sebesar **Rp 25.291.354.710,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp25.533,301.000,-**

3. Capaian indikator kinerja terendah dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** adalah Presentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Indeks Pelayanan Publik, Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura.
4. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, dan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.
5. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah pada sasaran kegiatan Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

6. Nilai indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 telah mencapai target yaitu sebesar 90,05 dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi, namun untuk predikat WBK belum dapat diperoleh dikarenakan masih terdapat satu (1) persyaratan yang belum terpenuhi sehingga tidak diusulkan oleh tim TPI ke TPN.
7. Pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan target untuk tahun 2023 dan 2024 berdasarkan hasil evaluasi pencapaian yaitu indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (Target 2024 akan dilakukan penyesuaian).

Secara umum capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Jayapura menunjukkan hasil yang baik meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Kendala atau permasalahan menjadi titik tolak dalam menyusun strategi untuk perbaikan kedepannya dan komitmen dari seluruh fungsi dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja BBPOM di Jayapura antara lain :

1. Perlu dilakukan reviu target indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% atau Tidak Dapat Disimpulkan yaitu indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dan Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang optimal.
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk kenaikan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024.
3. Berkoordinasi dengan Pusat data dan informasi terkait komponen yang menjadi penilaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi.
4. Perlu dilakukan KIE dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman, serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pembuatan materi edukasi sesuai dengan karakteristik wilayah
5. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran maupun capaian sasaran kegiatan secara berkala agar target indikator dapat tercapai secara maksimal.
6. Meningkatkan komitmen pembangunan ZI untuk mewujudkan Birokrasi Bebas Korupsi.

7. Memanfaatkan hasil analisis capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar dalam penetapan target kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 dapat digunakan sebagai sarana yang memberikan informasi secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Selain itu juga dapat digunakan sebagai titik tolak pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya dengan melihat capaian dan rekomendasi sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar perubahan target kinerja.

LAMPIRAN

M T M M H

MEMBANGUN BERSAMA

MELAYU



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Jayapura
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mojaza Sirait, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jayapura
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Jayapura

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.40
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	13
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86.8
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.4
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.9

Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunn (RKT) Tahun 2022



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

NOMOR PR.04.01.30A.12.21.5801 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penanggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

BADAN POM Email : bpom_jayapura@pom.go.id; bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website: www.pom.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

BADAN POM Email : bpom_jayapura@pom.go.id; bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website: www.pom.go.id

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 17 Desember 2021





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonomi Kotaraja Jayapura - Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

BADAN POM Email : bpom_jayapura@pom.go.id; bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website: www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR PR.04.01.30A.12.21.5801 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,51



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

BADAN POM Email : bpom_jayapura@pom.go.id; bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website: www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79
		Indeks Pelayanan Publik	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56		
Jumlah desa pangan aman	13		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

BADAN POM Email : bpom_jayapura@pom.go.id; bpmjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website: www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,8
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,4
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,9



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAYAPURA

MUHAMMAD SIRAIT

Lampiran 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Jayapura
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	371.899.220,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	103.899.600,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	111.086.780,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	108.140.400,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	142.342.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												68	29.300.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92,3	24.610.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												66,51	135.780.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90,5	16.620.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	38.400.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	497.339.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	285.603.600,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	134.537.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	819.850.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.40	729.185.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4	7	10	20	30	40	50	60	70	80	90	77	99.873.700,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	270.280.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20	30	35	40	45	50	60	70	90	56	1.057.228.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	25	30	40	50	50	65	75	85	95	13	1.448.557.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	27	35	43	54	63	71	78	90	95	100	518.450.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	28	38	48	55	62	73	80	93	99	100	317.913.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	5	10	20	25	30	35	40	40	45	48	50	766.872.000,00
23.	Indeks RB UPT												86.8	301.001.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												82.2	128.182.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84.4	1.064.337.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												77	3.027.739.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	126.416.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	85	87	88	88	89	89	90	90	91	92	92	92.9	15.604.464.700,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	25	40	55	60	70	70	80	90	90	12	498.425.000,00

Lampiran 4 Data Kertas Kerja tahun 2022

1. Sampling dan pengujian

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember											
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
						TIE/ legal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang																
1	Obat	Random	Jayapura	336	336	0	0	0	0	336	336	333	3	3	0	336
										0	0			0	0	0
			TOTAL	336	336	0	0	0	0	336	336	333	3	3	0	0
		Targeted	Jayapura	79	79	0	0	0	0	79	79	79		0	0	79
			TOTAL	79	79	0	0	0	0	79	79	79	0	0	0	79
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				415	415	0	0	0	415	415	412	3	3	0	415	
2	Obat Tradisional	Random	Jayapura		219	0	0	0	27	219	219	192	27	27	0	219
										0	0			0	0	0
			TOTAL	0	219	0	0	0	27	219	219	192	27	27	0	219
		Targeted	Jayapura		94	0	0	0	7	94	94	87	7	7	0	94
			TOTAL	0	94	0	0	0	7	94	94	87	7	7	0	94
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				0	313	0	0	34	313	313	279	34	34	0	313	
		Random	Jayapura	15	15	0	0	0	1	15	15	14	1	1	0	15
										0	0			0	0	0
			TOTAL	15	15	0	0	0	1	15	15	14	1	1	0	15
3	Obat Kuasi	Targeted	Jayapura	6	6	0	0	0	1	6	6	5	1	1	0	6
										0	0			0	0	0
			TOTAL	6	6	0	0	0	1	6	6	5	1	1	0	6
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				21	21	0	0	2	21	21	19	2	2	0	21	
4	Suplemen Kesehatan	Random	Jayapura		60	0	0	0	0	60	60	60	0	0	0	60
										0	0			0	0	0
			TOTAL	0	60	0	0	0	0	60	60	60	0	0	0	60
		Targeted	Jayapura		27	0	0	0	2	27	27	25	2	2	0	27
			TOTAL	0	27	0	0	0	2	27	27	25	2	2	0	27
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				0	87	0	0	2	87	85	2	2	0	87		
5	Kosmetik	Random	Jayapura		440	0	0	0	40	440	440	400	40	40	0	440
										0	0			0	0	0
			TOTAL	0	440	0	0	0	40	440	440	400	40	40	0	440
		Targeted	Jayapura		188	0	0	0	49	188	188	170	18	18	0	188
			TOTAL	0	188	0	0	0	49	188	188	170	18	18	0	188
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				0	628	0	0	89	628	628	570	58	58	0	628	
6	Rokok	Targeted	Jayapura	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
										0	0			0	0	0
			TOTAL	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
TOTAL	TOTAL	Random	Jayapura	351	1070	0	0	0	68	1070	1070	999	71	71	0	1070
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	351	1070	0	0	0	68	1070	1070	999	71	71	0	1070
		Targeted	Jayapura	89	398	0	0	0	59	398	398	370	28	28	0	398
			TOTAL	89	398	0	0	0	59	398	398	370	28	28	0	398
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK				440	1468	0	0	0	127	1468	1369	99	99	0	1468	
TOTAL				440	1468	0	0	0	127	1468	1468	1369	99	99	0	1468

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember											
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Jayapura	438	438	0	0	0	78	438	438	360	78	78	0	438
			TOTAL	438	438	0	0	0	78	438	438	360	78	78	0	438
		Targeted	Jayapura	141	141				13	141	141	131	10	10	0	141
			TOTAL	141	141	0	0	0	13	141	141	131	10	10	0	141
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				579	579	0	0	0	91	579	579	491	88	88	0	579
2	Fortifikasi	Targeted	Jayapura	125	125				3	125	125	108	17	17	0	125
			TOTAL	125	125	0	0	0	3	125	125	108	17	17	0	125
TOTAL PANGAN		Random	438	438	0	0	0	78	438	438	360	78	78	0	438	
		Targeted	266	266	0	0	0	16	266	266	239	27	27	0	266	
		TOTAL	704	704	0	0	0	94	704	704	599	105	105	0	704	

2. Pemeriksaan sarana produksi

No	Sarana Produksi	UPT	s.d Desember		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jayapura	1	1	0
		TOTAL	1	1	0
8	Industri Farmasi (IF) yang	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi	Jayapura	0	0	0
		TOTAL	0	0	0
13	Industri Pangan	Jayapura	20	17	3
		TOTAL	20	17	3
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jayapura	50	29	21
		TOTAL	50	29	21
TOTAL			71	47	24

3. Pemeriksaan sarana distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d Desember		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Jayapura	28	26	2
			0		
		TOTAL	28	26	2
2	Apotek	Jayapura	171	150	21
			0		
		TOTAL	171	150	21
3	Toko Obat	Jayapura	23	16	7
			0		
		TOTAL	23	16	7
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Jayapura	20	16	4
			0		
		TOTAL	20	16	4
5	Rumah Sakit (RS)	Jayapura	26	22	4
			0		
		TOTAL	26	22	4
6	Puskemas	Jayapura	74	68	6
			0		
		TOTAL	74	68	6
7	Klinik	Jayapura	24	16	8
			0		
		TOTAL	24	16	8
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Jayapura	0	0	0
			0		
		TOTAL	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Jayapura	0	0	0
			0		
		TOTAL	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Jayapura	26	24	2
			0		
		TOTAL	26	24	2
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	0
			0		
		TOTAL	0	0	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Jayapura	148	72	76
			0		
		TOTAL	148	72	76
13	Klinik Kecantikan	Jayapura	5	2	3
			0		
		TOTAL	5	2	3
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Jayapura	387	328	59
			0		
		TOTAL	387	328	59
	TOTAL		932	740	192

4. Sertifikasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Desember		
				Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Jayapura			
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Jayapura			
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Jayapura	7	7	
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Jayapura	456	456	
			0			
			0			
Total			Jayapura	463	463	100.00
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			Total	463	463	100.00

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Desember			
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Jayapura	72	77		
			TOTAL		72	77	93.51
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0		
			TOTAL		0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0		
			TOTAL		0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	34	39		
			TOTAL		34	39	87.18
Pangan	Jayapura	26	35				
	TOTAL		26	35	74.29		
	Total		132	151	87.42		
		Obat	Jayapura	0	6		
			TOTAL		0	6	0.00
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0		
			TOTAL		0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0		
			TOTAL		0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0		
	TOTAL		0	0	0		
Pangan	Jayapura	6	15				
	TOTAL		6	15	40.00		
	Total		6	21	28.57		
TOTAL			total	138	172	57.99	

6. Perkara

UPT	Tahapan	S.D. DESEMBER										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
Jayapura	SPDP	4	3	0		1,00		0,15	15,00%	98,50%	100,00%	98,50
	Tahap I			0	0	1,00	0,43	0,4	40,00%			
	P21			0	1	1,00	0,43	0,3	30,00%			
	Tahap II			4	2	1,00	0,29	0,15	13,50%			
	Total	4	3	4	3							

7. UMKM

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Des	CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN			
										Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS	
JAYAPURA	Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Jan-Maret	1	0	10	1	1	100,00	
		2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			20				
		3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			40				
		4	Sertifikasi	20%	90%	September-			20				
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			10				
	Total Progres									100			
	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Jan-Maret	1	0	10	1	1	100,00	
		2	Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Maret-April			40				
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			40				
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			10				
	Total Progres									100			
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-April	25	1	10	10	25	40,00	
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20				
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40				
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			20				
5		Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	10							
Total Progres									100				
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi							27	1	100,00			80,00	

8. PJAS

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DIPA) s.d Desember	Realisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun	
								Jayapura
2	Sosialisasi keamanan pangan	10.00	Maret - April	10.00				
3	Bimbingan teknis keamanan	15.00	April - Juni	15.00				
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10.00	April - Nov	10.00				
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15.00	Juli - Sept	15.00				
	- Pembentukan Tim Keamanan							
	- Intervensi Keamanan Pangan							
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20.00	Agustus - Nov	20.00				
7	Pengawasan	10.00	Okt - Des	10.00				
Total skor (Tahun N)		100.00		16	56	100.00	58	

9. DESA

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)	Realisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
						s.d Desember	
Jayapura	1 Advokasi Kelembagaan Desa	20.00	Januari-April	5	13	20.00	
	2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5.00	TW1-TW2			5.00	
	3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15.00	April-Juli			15.00	
	4 Blmtek Komunitas	15.00	Mai-Oktober			15.00	
	5 Fasilitas Keamanan Pangan	10.00	Juni-November			10.00	
	6 Intensifikasi Pengawasan	10.00	Mei-Oktober- Post Nover			10.00	
	7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan)	10.00	November-Desember			10.00	
	8 Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Desember			5.00	
	9 Pengawasan	10.00	Juni-Desember			10.00	
Total	100.00			5	13	100.00	13

10. PASAR

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)	Realisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
						s.d Desember	
Jayapura	1 Advokasi	20.00	Januari-April	4	12	20.00	12
	2 Survei Pasar	5.00	Januari-April			5.00	
	3 Blmtek Pengelola Pasar	15.00	April-Mei			15.00	
	4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15.00	April-Mei			15.00	
	5 Penyuluhan	10.00	Juni-Juli			10.00	
	6 Kampanye	10.00	Juni-Juli			10.00	
	7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15.00	September- Oktober			15.00	
	8 Pengawasan	10.00	Februari-Oktober			10.00	
Total	100.00			4	12	100.00	12

Lampiran 5 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	93.64	108.13	380,021,000	377,493,371	99.33	1.09	0.09	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82.19	100.23	104,400,000	104,328,556	99.93	1.00	0.00	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92.96	103.29	102,965,000	98,802,300	95.96	1.08	0.08	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92.91	108.03	107,640,000	101,422,950	94.22	1.15	0.15	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	86.4	97.08	142,342,000	139,209,369	97.80	0.99	- 0.01	75 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	68	65.8	96.76	36,388,000	36,209,110	99.51	0.97	- 0.03	75 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3	94.5	102.38	10,385,000	10,247,600	98.68	1.04	0.04	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.4	95.32	170,630,000	170,153,150	99.72	0.96	- 0.04	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5	89.4	98.78	11,428,000	11,363,000	99.43	0.99	- 0.01	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98.08	108.98	21,200,000	21,012,700	99.12	1.10	0.10	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101.75	498,222,000	495,630,316	99.48	1.02	0.02	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38	118,792,000	118,473,100	99.73	1.07	0.07	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66.2	110.33	134,537,000	130,302,460	96.85	1.14	0.14	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79.4	100.51	1,031,200,000	1,030,983,680	99.98	1.01	0.01	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
15	Indeks Pelayanan Publik	4.4	4.24	96.36	570,769,000	567,487,130	99.43	0.97	- 0.03	75 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103.90	99,840,000	98,700,300	98.86	1.05	0.05	100 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	93.33	101.23	265,084,000	263,934,067	99.57	1.02	0.02	100 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	58	103.57	751,228,000	744,628,986	99.12	1.04	0.04	100 %
19	Jumlah desa pangan aman	13	13	100.00	1,037,457,000	1,030,860,826	99.36	1.01	0.01	100 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12	12	100.00	498,425,000	497,510,150	99.82	1.00	0.00	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	518,450,000	518,447,300	100.00	1.00	0.00	100 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	317,913,000	317,010,228	99.72	1.00	0.00	100 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	198.00	635,752,000	612,117,690	96.28	2.06	1.06	86 %
24	Indeks RB UPT	86.8	90.05	103.74	392,767,000	392,306,455	99.88	1.04	0.04	100 %
25	Nilai AKIP UPT	82.2	78.25	95.19	13,480,000	13,410,320	99.48	0.96	- 0.04	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.4	85.4	101.18	476,764,000	460,434,342	96.57	1.05	0.05	100 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80.2	104.16	1,336,960,000	1,291,638,786	96.61	1.08	0.08	100 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.9	128.89	114,606,000	114,605,000	100.00	1.29	0.29	95 %
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.9	89.80	96.66	15,633,656,000	15,522,631,468	99.29	0.97	- 0.03	75 %
TOTAL				105.89	25,533,301,000	25,291,354,710	99.05	1.07	0.07	100 %

Lampiran 6 Perhitungan NPS

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN % PENYESUAIAN	
Stakeholder Perspective										
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	86.6	1002	1070	93.64	108.13	108.13
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	82	360	438	82.19	100.23	100.23
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	90	370	398	92.96	103.29	103.29
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	86	132	142	92.96	108.09	108.09
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	%	89	108	125	86.40	97.08	97.08
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS1: 102.09								103.37	103.37	
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks	68	-	65.80	96.76	96.76	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS2: 113.39								96.76	96.76	

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN % PENYESUAIAN	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	92.3	-	-	94.50	102.38	102.38
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	66.51	-	-	63.40	95.32	95.32
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	90.5	-	-	89.40	98.78	98.78
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS3: 98,94								98.83	98.83	
Capaian Stakeholder Perspective								99.65	99.65	
Internal Process Perspective										
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	90			98.08	108.98	108.98
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	57			58.00	101.75	101.75
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	94			100.00	106.38	106.38
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	60	47	71	66.20	110.33	110.33

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN % PENYESUAIAN	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	79	740	932	79.40	100.51	100.51
		15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.4	-	-	4.24	96.36	96.36
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Indeks	77		-	80.00	103.90	103.90
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS4: 105.83								104.03	104.03	
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	16	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	92.2			93.33	101.23	101.23
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	56			58	103.57	103.57
		18	Jumlah desa pangan aman	Desa	13			13	100.00	100.00
		19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	12			12	100.00	100.00
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS5: 100.78								101.20	101.20	
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100			100.1	100.10	100.10
		21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100			100	100.00	100.00

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN % PENYESUAIAN
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS6: 100.02								100.05	100.05
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	50		98.50	120.00	120.00
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS7: 167.50								120.00	120.00
Capaian Internal Process Perspective								106.32	106.32
Learning & Growth Perspective									
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang optimal	23	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Indeks	86.8		90.05	103.74	103.74
		24	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Nilai	82.2		78.25	95.19	95.19
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS8:								99.47	99.47
SS9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Indeks	84.4		85.40	101.18	101.18

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN % PENYESUAIAN
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS9: 101.11								101.18	101.18
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	77		80.20	104.16	104.16
		27	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang optimal	Indeks	2.25		2.9	120.00	120.00
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS10: 102.08								112.08	112.08
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura secara Akuntabel	28	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Nilai	92.9		89.80	96.66	96.66
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS11: 101,29					Baik			96.66	96.66
Learning & Growth Perspective								102.35	102.35
NPS TOTAL								102.77	102.77



**BBPOM
DI JAYAPURA**



SMS : 081219999533
EMAIL : halobpom@pom.go.id
@HaloBPOM1500533



082217727111
 jayapura.pom.go.id

@bbpom_jayapura
 bpom_jayapura@pom.go.id

bbpomjayapura

(0967) 5186777

BBPOM Di Jayapura

BBPOM Jayapura